



HAK CIPTA/COPYRIGHT

© 2024 Dr. Bahdar, M.H.I
Email bahdar@uindatokarama.ac.id
HP.081.341.207.628

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak atau menyebarkan seluruh atau sebagian isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik cetak maupun elektronik, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis, kecuali untuk keperluan pendidikan dengan menyebut sumbernya.

Penerbit:

Foto Copy Maestro Lere Palu Barat

Alamat: Jl. Diponegoro No.12, Palu, Sulawesi Tengah

Cetakan Pertama: Desember 2024

ISBN: Nomor belum ada

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul *Islam dan Masa Depan Tanah Kaili: Pendidikan Islam, Kearifan Lokal, dan Dinamika Sosial* ini dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., teladan agung dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai keimanan, keadilan, dan kemanusiaan.

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus kepedulian sosial terhadap dinamika kehidupan keislaman masyarakat Tanah Kaili yang terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Islam di Tanah Kaili tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh, bersemi, dan berinteraksi secara dialogis dengan budaya lokal, adat istiadat, serta struktur sosial masyarakat. Relasi inilah yang membentuk corak keberagamaan yang khas, moderat, dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal.

Melalui buku ini, penulis berupaya menegaskan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan nilai keislaman dan kearifan lokal, sekaligus menjadi motor perubahan sosial yang konstruktif. Pendidikan Islam tidak hanya dimaknai sebagai proses transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, etika sosial, dan kesadaran kebudayaan. Dalam konteks inilah madrasah,

guru, tokoh agama, dan lembaga pendidikan diposisikan sebagai aktor penting dalam membangun masa depan Tanah Kaili yang harmonis dan berkeadaban.

Buku ini membahas secara komprehensif konteks sejarah dan budaya Tanah Kaili, relasi adat dan agama, praktik kearifan lokal, hingga tantangan globalisasi dan digitalisasi budaya. Dengan pendekatan sosio-kultural dan pendidikan Islam, pembahasan diarahkan untuk menunjukkan bahwa Islam dan budaya lokal bukanlah dua entitas yang saling menegasikan, melainkan dapat saling menguatkan dalam membangun identitas sosial dan peradaban lokal.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari ikhtiar akademik untuk terus menyempurnakan kajian tentang Islam, pendidikan, dan masyarakat lokal. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan Islam, memperkaya khazanah keilmuan, serta menjadi inspirasi dalam merawat harmoni sosial dan masa depan Tanah Kaili.

Semoga Allah Swt. meridai setiap ikhtiar kecil yang dilakukan dalam upaya menegakkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan.

Wallāhu al-Muwaffiq ilā aqwamit-tharīq.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam di Tanah Kaili bukanlah agama yang hadir secara tiba-tiba dan terpisah dari kehidupan masyarakatnya. Ia tumbuh, berkembang, dan bersemi melalui perjumpaan panjang dengan adat, nilai sosial, serta kearifan lokal yang telah lebih dahulu hidup di tengah masyarakat. Dalam proses ini, Islam tidak meniadakan budaya, melainkan berdialog dengannya, membentuk corak keberislaman yang damai, moderat, dan membumi. Inilah wajah Islam yang hidup dalam keseharian orang Kaili: Islam yang dipraktikkan, dirasakan, dan diwariskan lintas generasi.

Namun, perubahan zaman menghadirkan tantangan baru. Arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan perubahan pola relasi sosial telah membawa dampak besar terhadap cara masyarakat memahami agama. Nilai-nilai lokal yang dahulu menjadi penyangga harmoni sosial perlahan mengalami pergeseran. Di sisi lain, muncul kecenderungan keberagamaan yang lebih formal, kaku, dan kadang terlepas dari konteks budaya setempat. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting: ke mana arah Islam di Tanah Kaili akan bergerak di masa depan?

Dalam konteks inilah pendidikan Islam menempati posisi yang sangat strategis. Pendidikan Islam bukan sekadar ruang transfer ilmu keagamaan, tetapi juga arena pembentukan cara pandang, sikap hidup, dan

tanggung jawab sosial. Sejalan dengan gagasan pendidikan Islam humanis, pendidikan seharusnya mampu menanamkan nilai-nilai keislaman yang menyatu dengan realitas sosial dan budaya peserta didik. Pendidikan Islam yang tercerabut dari konteks lokal berisiko melahirkan pemahaman agama yang normatif, tetapi kurang peka terhadap persoalan sosial di sekitarnya.

Kearifan lokal masyarakat Kaili sesungguhnya memiliki kesesuaian mendalam dengan nilai-nilai Islam. Prinsip kebersamaan, musyawarah, penghormatan terhadap alam, serta etika sosial yang dijunjung dalam adat Kaili sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dalam perspektif pemikiran Islam kontemporer, kearifan lokal dapat dipahami sebagai *modal sosial* dan *sumber etika publik* yang memperkuat keberagamaan. Islam, dalam hal ini, tidak hanya dipahami sebagai sistem ibadah, tetapi sebagai pedoman hidup yang menata relasi manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam.

Sayangnya, integrasi antara pendidikan Islam dan kearifan lokal belum sepenuhnya terwujud secara sistematis. Pendidikan sering kali berjalan dengan pendekatan seragam dan kurang memberi ruang pada kekayaan budaya lokal. Padahal, pemikiran pendidikan kontekstual menegaskan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna ketika berangkat dari pengalaman hidup dan lingkungan sosial peserta didik. Di Tanah Kaili, konteks budaya lokal semestinya menjadi sumber inspirasi, bukan sekadar pelengkap.

Oleh karena itu, pembahasan tentang *Islam dan Masa Depan Tanah Kaili* menjadi sangat relevan. Buku ini berangkat dari keyakinan bahwa masa depan Islam di Tanah Kaili sangat ditentukan oleh bagaimana pendidikan Islam mampu merawat kearifan lokal sekaligus merespons dinamika sosial yang terus berubah. Dengan pendekatan yang reflektif dan kontekstual, Islam diharapkan tetap menjadi kekuatan moral, sosial, dan kultural yang menuntun masyarakat Kaili menuju masa depan yang harmonis, berkeadaban, dan berakar pada jati diri lokal.

B. Islam dan Identitas Sosial Tanah Kaili

Identitas sosial masyarakat Tanah Kaili terbentuk melalui proses historis dan kultural yang panjang, di mana Islam memainkan peran sentral dalam membentuk sistem nilai, pola relasi sosial, dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. Islam di Tanah Kaili tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan teologis, tetapi juga sebagai kerangka etis dan simbolik yang memengaruhi struktur sosial dan praktik budaya masyarakat. Dalam konteks ini, Islam menjadi salah satu unsur utama dalam konstruksi identitas sosial masyarakat Kaili.

Secara sosiologis, identitas sosial dipahami sebagai hasil interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya, yang dibentuk melalui nilai, norma, simbol, dan praktik kolektif. Islam, sebagai agama yang hidup dalam masyarakat Kaili, telah mengalami proses internalisasi yang menyatu dengan adat dan tradisi lokal. Proses ini melahirkan identitas keislaman yang

bersifat kontekstual, di mana ajaran Islam dipraktikkan selaras dengan kearifan lokal tanpa kehilangan substansi normatifnya. Dengan demikian, identitas sosial masyarakat Kaili merepresentasikan integrasi antara nilai-nilai keislaman dan budaya lokal.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Kaili, Islam berfungsi sebagai sumber legitimasi moral dan sosial. Nilai-nilai Islam menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan sosial, penyelesaian konflik, serta penguatan solidaritas komunitas. Praktik-praktik keagamaan seperti ritual kolektif, tradisi keagamaan lokal, dan peran tokoh agama menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berada di ruang privat, tetapi hadir secara aktif dalam ruang publik. Hal ini menegaskan bahwa identitas sosial masyarakat Kaili bersifat religius-komunal, di mana agama dan kehidupan sosial saling berkelindan.

Namun, identitas sosial tersebut tidak bersifat statis. Dinamika sosial modern, seperti urbanisasi, pendidikan formal, media digital, dan mobilitas sosial, turut memengaruhi cara masyarakat Kaili memaknai identitas keislamannya. Dalam beberapa kasus, terjadi pergeseran dari identitas keislaman yang berbasis komunitas menuju bentuk identitas yang lebih individual dan simbolik. Pergeseran ini menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai lokal yang bersifat kolektif dengan pola keberagamaan baru yang cenderung normatif dan homogen.

Di sisi lain, Islam juga memiliki potensi sebagai kekuatan integratif dalam merawat identitas sosial

masyarakat Kaili di tengah perubahan. Perspektif Islam moderat dan kontekstual menawarkan kerangka pemikiran yang mampu menjembatani tradisi dan modernitas. Melalui pendekatan ini, Islam tidak diposisikan sebagai faktor disintegratif, melainkan sebagai sumber nilai yang memperkuat kohesi sosial, toleransi, dan harmoni antarwarga.

Dengan demikian, Islam dan identitas sosial Tanah Kaili berada dalam hubungan dialektis yang terus berkembang. Identitas sosial masyarakat Kaili tidak dapat dilepaskan dari Islam, sementara Islam di Tanah Kaili memperoleh makna sosialnya melalui interaksi dengan budaya lokal dan realitas sosial yang dinamis. Pemahaman terhadap relasi ini menjadi landasan penting bagi pengembangan pendidikan Islam dan kebijakan sosial yang sensitif terhadap konteks lokal, serta berorientasi pada penguatan identitas sosial yang inklusif dan berkeadaban.

C. Pendidikan Islam sebagai Basis Perubahan Sosial

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan sosial, khususnya dalam masyarakat yang menjadikan agama sebagai sumber nilai utama, seperti masyarakat Tanah Kaili. Pendidikan Islam tidak hanya dipahami sebagai proses transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran sosial, moral, dan kultural. Dalam perspektif ini, pendidikan Islam berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang mampu mengarahkan perubahan menuju tatanan masyarakat yang berkeadilan, berkeadaban, dan berkelanjutan.

Secara konseptual, pendidikan Islam bertumpu pada tujuan pembentukan insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Tujuan tersebut mengandung dimensi sosial yang kuat, karena akhlak dan kesalehan dalam Islam tidak berhenti pada ranah individual, melainkan berimplikasi pada tanggung jawab sosial. Pemikiran pendidikan Islam kontemporer menegaskan bahwa proses pendidikan harus melahirkan kesadaran kritis terhadap realitas sosial, sehingga peserta didik mampu membaca persoalan masyarakat dan berperan aktif dalam penyelesaiannya.

Dalam konteks perubahan sosial, pendidikan Islam berfungsi sebagai medium internalisasi nilai-nilai etis yang menjadi landasan perilaku sosial. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan kepedulian sosial, ketika ditanamkan melalui proses pendidikan yang sistematis, akan membentuk habitus sosial yang konstruktif. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mereproduksi struktur sosial yang ada, tetapi juga memiliki potensi transformatif untuk memperbaiki dan merekonstruksi praktik sosial yang tidak selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Namun demikian, efektivitas pendidikan Islam sebagai basis perubahan sosial sangat bergantung pada pendekatan pedagogis yang digunakan. Pendidikan Islam yang bersifat normatif-doktrinal cenderung menghasilkan pemahaman agama yang tekstual dan kurang responsif terhadap dinamika sosial. Sebaliknya, pendekatan pendidikan Islam yang kontekstual dan dialogis membuka ruang bagi peserta didik untuk mengaitkan ajaran Islam dengan pengalaman sosial dan

budaya lokal. Pendekatan ini sejalan dengan teori pendidikan kritis yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran.

Di Tanah Kaili, pendidikan Islam memiliki peluang besar untuk berperan sebagai kekuatan perubahan sosial yang berbasis kearifan lokal. Integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam pendidikan Islam dapat memperkuat relevansi sosial pembelajaran sekaligus menjaga keberlanjutan identitas budaya masyarakat. Pendidikan Islam yang sensitif terhadap konteks lokal tidak hanya mentransfer nilai agama, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya harmoni sosial, pelestarian budaya, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan demikian, pendidikan Islam sebagai basis perubahan sosial harus dipahami sebagai proses yang dinamis dan berkelanjutan. Ia menuntut rekonstruksi kurikulum, metode pembelajaran, serta peran pendidik agar lebih responsif terhadap tantangan sosial kontemporer. Melalui pendidikan Islam yang transformatif, masyarakat Tanah Kaili diharapkan mampu menghadapi perubahan sosial tanpa kehilangan jati diri keislaman dan kulturalnya, serta menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi dalam membangun masa depan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

D. Problematika dan Tantangan Sosial Keagamaan Kontemporer

Perkembangan sosial kontemporer menghadirkan berbagai problematika dan tantangan baru dalam kehidupan keagamaan masyarakat, termasuk di Tanah

Kaili. Perubahan sosial yang ditandai oleh globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memahami, mengekspresikan, dan mempraktikkan ajaran agama. Dalam konteks ini, agama tidak lagi berada dalam ruang sosial yang homogen, melainkan berhadapan dengan beragam ideologi, nilai, dan otoritas keagamaan yang saling berkompetisi.

Salah satu problematika utama adalah terjadinya fragmentasi otoritas keagamaan. Media digital dan ruang virtual memungkinkan siapa pun untuk menyampaikan tafsir keagamaan tanpa melalui mekanisme otoritatif yang mapan. Kondisi ini melahirkan beragam pemahaman keagamaan yang tidak selalu sejalan dengan tradisi keislaman lokal yang moderat dan berakar pada kearifan budaya. Akibatnya, masyarakat, khususnya generasi muda, rentan terpapar pada pemahaman keagamaan yang bersifat simplistik, tekstual, dan kurang sensitif terhadap konteks sosial.

Selain itu, muncul kecenderungan formalisasi dan simbolisasi agama yang berlebihan. Praktik keagamaan sering kali diukur dari aspek simbolik dan ritualistik semata, sementara dimensi etis dan sosial Islam kurang mendapatkan perhatian. Fenomena ini berpotensi menggeser orientasi keberagamaan dari substansi nilai menuju ekspresi identitas yang kaku. Dalam masyarakat yang memiliki tradisi kolektif seperti Tanah Kaili, kecenderungan ini dapat melemahkan solidaritas sosial dan memperuncing perbedaan internal.

Problematika lain yang tidak kalah penting adalah melemahnya integrasi antara agama dan budaya lokal. Globalisasi budaya dan standar keagamaan yang seragam mendorong terpinggirkannya praktik-praktik keagamaan lokal yang sebelumnya berfungsi sebagai perekat sosial. Kearifan lokal yang selaras dengan nilai-nilai Islam berisiko dipandang sebagai sesuatu yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Padahal, pengabaian terhadap dimensi budaya lokal dapat menciptakan jarak antara agama dan realitas sosial masyarakat.

Di sisi lain, tantangan sosial keagamaan kontemporer juga berkaitan dengan perubahan struktur sosial dan ekonomi. Urbanisasi, mobilitas sosial, serta meningkatnya individualisme memengaruhi pola relasi sosial dan keberagamaan. Agama cenderung dipraktikkan secara personal dan terlepas dari tanggung jawab sosial. Kondisi ini menantang peran institusi keagamaan dan pendidikan Islam dalam membangun kembali kesadaran kolektif dan etos sosial keagamaan.

Dengan demikian, problematika dan tantangan sosial keagamaan kontemporer menuntut respons yang komprehensif dan kontekstual. Pendekatan normatif yang kaku tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas realitas sosial. Diperlukan upaya rekonstruksi pemahaman dan praktik keagamaan yang menempatkan Islam sebagai sumber nilai yang adaptif, inklusif, dan transformatif. Dalam konteks Tanah Kaili, penguatan pendidikan Islam berbasis kearifan lokal dan dialog sosial menjadi strategi penting untuk merespons

tantangan tersebut, sekaligus menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan identitas keagamaan masyarakat.

E. Arah, Tujuan, dan manfaat buku

Buku *Islam dan Masa Depan Tanah Kaili: Pendidikan Islam, Kearifan Lokal, dan Dinamika Sosial* disusun sebagai upaya akademik dan reflektif untuk membaca secara kritis relasi antara Islam, budaya lokal, dan perubahan sosial dalam konteks masyarakat Tanah Kaili. Arah utama buku ini adalah mengembangkan perspektif keislaman yang kontekstual dan transformatif, dengan menempatkan pendidikan Islam sebagai basis strategis dalam merespons dinamika sosial keagamaan kontemporer.

Secara konseptual, buku ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman bahwa Islam di Tanah Kaili tidak dapat dilepaskan dari proses historis dan kultural yang membentuk identitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, buku ini berupaya mengintegrasikan pendekatan keislaman dengan kearifan lokal sebagai kerangka analisis dalam membaca praktik sosial dan pendidikan Islam. Arah ini sekaligus menegaskan posisi buku sebagai kontribusi terhadap pengembangan kajian Islam lokal yang relevan dengan tantangan global.

Adapun tujuan penulisan buku ini adalah, pertama, menganalisis peran Islam dalam pembentukan identitas sosial masyarakat Tanah Kaili di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Kedua, mengkaji pendidikan Islam sebagai instrumen perubahan sosial yang berpotensi memperkuat nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal secara berkelanjutan. Ketiga,

mengidentifikasi problematika dan tantangan sosial keagamaan kontemporer serta merumuskan pendekatan konseptual yang adaptif dan kontekstual dalam meresponsnya. Keempat, menawarkan kerangka pemikiran yang dapat menjadi dasar pengembangan pendidikan Islam berbasis budaya lokal.

Manfaat buku ini diharapkan dapat dirasakan baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, buku ini memberikan kontribusi terhadap pengayaan khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam kajian pendidikan Islam kontekstual dan studi Islam lokal. Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti, dosen, dan mahasiswa dalam memahami relasi antara agama, budaya, dan perubahan sosial. Secara praktis, buku ini diharapkan menjadi bahan refleksi dan panduan bagi pendidik, pengelola lembaga pendidikan Islam, tokoh agama, dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi pendidikan dan pembinaan keagamaan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat Tanah Kaili.

Dengan demikian, buku ini tidak hanya dimaksudkan sebagai dokumentasi pemikiran, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya merawat Islam yang berakar pada kearifan lokal dan responsif terhadap tantangan zaman. Melalui pendekatan yang integratif dan transformatif, buku ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan peran Islam dalam membangun masa depan Tanah Kaili yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban.

BAB II

TANAH KAILI: KONTEKS BUDAYA, SEJARAH, DAN STRUKTUR SOSIAL

A. Sejarah Sosial dan Budaya Masyarakat Kaili

Masyarakat Kaili merupakan kelompok etnis utama yang mendiami wilayah Lembah Palu dan sekitarnya, yang secara historis memiliki sistem sosial dan budaya yang berkembang sebelum masuknya pengaruh agama-agama besar, termasuk Islam. Dalam fase awal, kehidupan sosial masyarakat Kaili dibangun di atas struktur komunal yang kuat, dengan adat sebagai landasan utama dalam mengatur relasi sosial, kepemimpinan, serta hubungan manusia dengan alam. Adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk identitas kolektif masyarakat Kaili.

Struktur sosial masyarakat Kaili secara tradisional ditandai oleh keberadaan lembaga-lembaga adat dan kepemimpinan lokal yang memiliki otoritas moral dan sosial. Pemimpin adat berperan sebagai penengah dalam penyelesaian konflik, penjaga keseimbangan sosial, serta simbol persatuan komunitas. Dalam konteks ini, budaya Kaili menekankan nilai kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap tatanan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pola relasi sosial yang bersifat kolektif ini menjadi ciri khas masyarakat Kaili dalam menghadapi berbagai perubahan sosial.

Masuknya Islam ke wilayah Tanah Kaili membawa transformasi signifikan dalam lanskap sosial dan

budaya masyarakat. Proses Islamisasi berlangsung secara bertahap dan relatif damai melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan peran tokoh-tokoh agama. Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang menegasikan adat, melainkan berinteraksi dan berdialog dengan sistem nilai lokal. Akibatnya, terjadi proses akulturasi di mana nilai-nilai Islam diinternalisasi ke dalam praktik adat dan budaya masyarakat Kaili.

Dalam proses historis tersebut, adat dan Islam berkembang dalam relasi yang saling melengkapi. Adat memberikan kerangka sosial dan budaya, sementara Islam menawarkan landasan moral dan spiritual yang memperkaya sistem nilai masyarakat. Relasi ini membentuk corak budaya Kaili yang religius-kultural, di mana praktik sosial dan tradisi lokal sering kali memiliki dimensi keagamaan. Dengan demikian, sejarah sosial masyarakat Kaili tidak dapat dilepaskan dari dinamika perjumpaan antara adat dan Islam.

Perkembangan sosial modern kemudian membawa perubahan baru dalam struktur dan budaya masyarakat Kaili. Integrasi wilayah ke dalam sistem pemerintahan nasional, perkembangan pendidikan formal, serta arus globalisasi turut memengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya. Beberapa nilai tradisional mengalami penyesuaian, sementara sebagian lainnya menghadapi tantangan keberlanjutan. Meski demikian, identitas budaya Kaili tetap bertahan sebagai bagian penting dari jati diri masyarakat, meskipun dalam bentuk yang terus mengalami transformasi.

Dengan demikian, sejarah sosial dan budaya masyarakat Kaili menunjukkan adanya kontinuitas dan perubahan yang saling berkaitan. Adat, Islam, dan dinamika sosial modern membentuk lapisan-lapisan historis yang memengaruhi struktur sosial dan identitas budaya masyarakat Kaili hingga saat ini. Pemahaman terhadap sejarah sosial dan budaya ini menjadi landasan penting untuk membaca perkembangan pendidikan Islam dan praktik keagamaan masyarakat Kaili dalam konteks sosial kontemporer.

B. Nilai-Nilai Dasar Budaya Lokal Tanah Kaili

Budaya lokal masyarakat Tanah Kaili dibangun di atas seperangkat nilai dasar yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial, membentuk karakter kolektif, serta menjaga harmoni antarwarga. Nilai-nilai tersebut lahir dari pengalaman historis masyarakat Kaili dalam berinteraksi dengan lingkungan alam, struktur sosial, dan dinamika kehidupan bersama. Dalam konteks ini, nilai budaya tidak hanya dipahami sebagai tradisi simbolik, tetapi sebagai sistem makna yang hidup dan terus diwariskan lintas generasi.

Salah satu nilai dasar yang menonjol dalam budaya Kaili adalah kebersamaan dan solidaritas sosial. Kehidupan masyarakat Kaili secara tradisional menekankan pentingnya kerja kolektif, saling membantu, dan rasa tanggung jawab bersama. Nilai ini tercermin dalam berbagai praktik sosial seperti gotong royong, musyawarah adat, dan keterlibatan komunitas dalam berbagai kegiatan sosial. Kebersamaan tidak

hanya dimaknai sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Nilai musyawarah dan penghormatan terhadap konsensus juga menjadi landasan penting dalam budaya Kaili. Setiap persoalan sosial yang menyangkut kepentingan bersama diselesaikan melalui dialog dan pertimbangan kolektif dengan melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Nilai ini menunjukkan adanya orientasi budaya yang mengedepankan keadilan sosial dan penghargaan terhadap suara komunitas. Dalam konteks sosial yang majemuk, musyawarah berfungsi sebagai instrumen penting dalam mencegah konflik dan memperkuat kohesi sosial.

Selain itu, masyarakat Kaili menjunjung tinggi nilai penghormatan terhadap alam. Lingkungan alam dipandang bukan sekadar sumber daya ekonomi, tetapi sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual. Relasi manusia dan alam dibangun atas dasar keseimbangan dan tanggung jawab moral. Nilai ini membentuk etika ekologis yang mengarahkan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari eksploitasi yang berlebihan. Dalam perspektif kontemporer, nilai ini memiliki relevansi kuat dengan wacana keberlanjutan dan etika lingkungan.

Nilai etika sosial dan penghormatan terhadap tatanan sosial juga menjadi bagian penting dari budaya Kaili. Norma kesopanan, rasa hormat kepada orang tua dan pemimpin adat, serta kepatuhan terhadap aturan

bersama menjadi fondasi dalam membangun relasi sosial yang harmonis. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga stabilitas dan keteraturan kehidupan masyarakat. Dalam proses sosialisasi, nilai etika tersebut ditanamkan sejak dini melalui keluarga, komunitas, dan institusi adat.

Dengan demikian, nilai-nilai dasar budaya lokal Tanah Kaili membentuk sistem sosial yang berorientasi pada kebersamaan, keadilan, dan keseimbangan. Nilai-nilai ini tidak bersifat statis, tetapi terus beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi. Pemahaman terhadap nilai-nilai dasar budaya Kaili menjadi penting dalam mengkaji peran Islam dan pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat, karena nilai-nilai tersebut menyediakan kerangka kultural yang dapat memperkuat internalisasi ajaran keislaman secara kontekstual dan berkelanjutan.

C. Relasi Adat, Agama, dan Struktur Sosial

Relasi antara adat, agama, dan struktur sosial merupakan tema sentral dalam kajian masyarakat tradisional dan religius, termasuk masyarakat Tanah Kaili. Para ahli sosiologi dan antropologi sepakat bahwa adat dan agama bukan sekadar sistem normatif yang berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk struktur sosial dan pola relasi masyarakat. Dalam konteks ini, struktur sosial dipahami sebagai pola hubungan yang relatif stabil, yang diatur oleh norma, nilai, dan institusi sosial.

Menurut Émile Durkheim, agama berfungsi sebagai fakta sosial yang memiliki kekuatan kolektif dalam

membentuk solidaritas dan keteraturan sosial. Agama tidak hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga menciptakan kesadaran kolektif yang mengikat individu dalam satu komunitas sosial. Dalam masyarakat seperti Tanah Kaili, fungsi agama ini tampak dalam perannya sebagai sumber legitimasi moral bagi adat dan struktur sosial yang berlaku. Nilai-nilai keagamaan memberikan makna sakral terhadap aturan adat, sehingga memperkuat kepatuhan sosial masyarakat.

Sementara itu, perspektif antropologi budaya yang dikemukakan oleh Clifford Geertz menekankan bahwa agama harus dipahami sebagai sistem simbol yang memberi kerangka makna bagi tindakan sosial. Dalam kerangka ini, adat berfungsi sebagai medium kultural tempat simbol-simbol keagamaan diwujudkan dalam praktik sosial. Relasi adat dan agama bersifat dialogis, di mana ajaran agama diterjemahkan ke dalam simbol, ritus, dan norma adat yang dapat dipahami oleh masyarakat lokal. Proses ini memungkinkan agama berakar kuat dalam struktur sosial masyarakat tanpa kehilangan makna normatifnya.

Dalam tradisi pemikiran Islam, relasi antara adat dan agama dikenal melalui konsep *al-‘urf*, yaitu kebiasaan masyarakat yang diakui sebagai sumber pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Para ulama ushul fikih, seperti al-Qarafi dan Ibn ‘Ashur, menegaskan bahwa adat memiliki peran penting dalam menjaga kemaslahatan sosial. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam secara epistemologis membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai lokal ke dalam

tatanan sosial dan hukum, termasuk dalam pembentukan struktur sosial masyarakat.

Dalam konteks Tanah Kaili, relasi adat dan agama membentuk struktur sosial yang bersifat religius-kultural. Lembaga adat dan tokoh agama memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Struktur kepemimpinan sosial tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan formal, tetapi juga oleh otoritas moral yang bersumber dari adat dan agama. Relasi ini menciptakan keseimbangan antara norma tradisional dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial masyarakat.

Namun, para ahli sosiologi modern seperti Anthony Giddens mengingatkan bahwa struktur sosial bersifat dinamis dan terus direproduksi melalui praktik sosial. Dalam masyarakat kontemporer, relasi adat dan agama menghadapi tantangan akibat perubahan sosial, seperti modernisasi, birokratisasi, dan globalisasi budaya. Struktur sosial yang sebelumnya stabil mengalami negosiasi ulang, termasuk dalam hal otoritas adat dan agama. Hal ini menuntut kemampuan adaptasi agar relasi adat, agama, dan struktur sosial tetap relevan dengan konteks zaman.

Dengan demikian, relasi adat, agama, dan struktur sosial di Tanah Kaili dapat dipahami sebagai hubungan dialektis yang saling memengaruhi. Adat menyediakan kerangka kultural, agama memberikan legitimasi moral dan spiritual, sementara struktur sosial menjadi ruang aktualisasi keduanya. Pemahaman akademik terhadap relasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan

pendidikan Islam dan kebijakan sosial yang sensitif terhadap konteks lokal, serta mampu menjaga harmoni sosial di tengah dinamika perubahan masyarakat.

D. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial Masyarakat

Kearifan lokal merupakan salah satu unsur penting dalam membangun dan menjaga keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Dalam kajian sosial, kearifan lokal dipahami sebagai himpunan nilai, norma, pengetahuan, dan praktik sosial yang lahir dari pengalaman historis suatu komunitas dalam merespons lingkungan alam dan sosialnya. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku individual, tetapi juga sebagai sumber daya sosial yang memperkuat kohesi dan keberlanjutan masyarakat. Dalam konteks ini, kearifan lokal dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial.

Konsep modal sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, merujuk pada sumber daya yang dimiliki individu atau kelompok melalui jaringan sosial, relasi kepercayaan, dan norma yang diakui bersama. Sementara itu, Robert Putnam menekankan bahwa modal sosial tercermin dalam kepercayaan (trust), norma timbal balik, dan partisipasi sosial yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif. Kearifan lokal, dengan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan musyawarah, memiliki karakteristik yang sejalan dengan konsep modal sosial tersebut.

Dalam masyarakat Tanah Kaili, kearifan lokal berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga stabilitas dan harmoni kehidupan bersama. Nilai-nilai seperti

kebersamaan, penghormatan terhadap adat, dan tanggung jawab kolektif membentuk jaringan sosial yang kuat dan berkelanjutan. Kearifan lokal ini menjadi basis terbentuknya kepercayaan sosial, yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan persoalan secara kolektif tanpa bergantung sepenuhnya pada mekanisme formal negara.

Selain itu, kearifan lokal juga berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial. Norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat berfungsi mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan kepentingan bersama. Dalam perspektif fungsionalisme sosial, mekanisme ini berkontribusi pada terciptanya keteraturan dan integrasi sosial. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki fungsi sosial yang nyata dalam menjaga keseimbangan masyarakat.

Dalam konteks perubahan sosial kontemporer, kearifan lokal sebagai modal sosial menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Globalisasi budaya, individualisasi, dan melemahnya institusi tradisional berpotensi menggerus nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi fondasi kehidupan sosial. Namun demikian, para ahli juga menegaskan bahwa modal sosial bersifat dinamis dan dapat direproduksi melalui proses pendidikan, partisipasi sosial, dan penguatan institusi komunitas.

Oleh karena itu, upaya pelestarian dan penguatan kearifan lokal sebagai modal sosial menjadi sangat penting. Dalam masyarakat Tanah Kaili, penguatan tersebut dapat dilakukan melalui integrasi nilai-nilai

lokal ke dalam pendidikan Islam dan pendidikan formal secara umum. Dengan menjadikan kearifan lokal sebagai sumber nilai dan praktik sosial, masyarakat tidak hanya mampu mempertahankan identitas budaya, tetapi juga meningkatkan kapasitas kolektif dalam menghadapi tantangan sosial yang terus berkembang.

Dengan demikian, kearifan lokal sebagai modal sosial memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang kohesif, adaptif, dan berkelanjutan. Pemahaman akademik terhadap peran ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan sosial dan pendidikan yang berbasis konteks lokal serta berorientasi pada penguatan nilai-nilai kebersamaan dan keadaban sosial.

E. Dinamika Perubahan Sosial di Era Modern

Perubahan sosial merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam kajian sosiologi, perubahan sosial dipahami sebagai transformasi pola-pola kehidupan sosial yang mencakup perubahan nilai, norma, struktur sosial, dan relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat (Soekanto, 2017). Era modern ditandai oleh percepatan perubahan yang dipicu oleh globalisasi, kemajuan teknologi, urbanisasi, serta meningkatnya mobilitas sosial. Kondisi ini turut memengaruhi masyarakat lokal, termasuk masyarakat Tanah Kaili, baik dalam aspek budaya, keagamaan, maupun struktur sosial.

Teori modernisasi menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi seiring dengan pergeseran masyarakat dari pola tradisional menuju pola yang lebih rasional dan institusional (Inkeles & Smith, 1974). Dalam konteks

ini, institusi-institusi tradisional seperti adat dan otoritas lokal mengalami penyesuaian akibat masuknya sistem pendidikan formal, birokrasi modern, dan media massa. Di Tanah Kaili, proses ini tampak dalam perubahan pola relasi sosial yang sebelumnya berbasis komunitas menjadi lebih individual dan fungsional.

Anthony Giddens (1991) menegaskan bahwa modernitas membawa konsekuensi berupa *disembedding*, yaitu terlepasnya relasi sosial dari konteks lokal dan tradisional. Relasi sosial semakin dimediasi oleh sistem abstrak seperti teknologi, media digital, dan institusi formal. Dampaknya, ikatan sosial yang sebelumnya dibangun atas dasar kedekatan kultural dan adat mengalami pelemahan. Dalam masyarakat Kaili, kondisi ini berpengaruh terhadap berkurangnya peran adat sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan sosial, khususnya di kalangan generasi muda.

Selain itu, globalisasi budaya turut mempercepat perubahan orientasi nilai masyarakat. Menurut Appadurai (1996), arus global membentuk lanskap budaya baru yang memengaruhi cara masyarakat memaknai identitas dan tradisi. Nilai-nilai lokal berhadapan dengan nilai global yang sering kali bersifat seragam dan komersial. Akibatnya, kearifan lokal yang selama ini menjadi basis harmoni sosial berpotensi mengalami marginalisasi apabila tidak direkonstruksi secara adaptif.

Dalam dimensi keagamaan, perubahan sosial modern juga memengaruhi pola keberagamaan masyarakat.

Berger (1967) menyebut bahwa modernitas mendorong pluralisasi pemahaman agama, di mana otoritas keagamaan tidak lagi tunggal. Media digital membuka ruang bagi beragam tafsir dan ekspresi keberagamaan yang tidak selalu selaras dengan tradisi lokal. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat Tanah Kaili dalam menjaga keseimbangan antara keberagamaan, adat, dan kohesi sosial.

Meskipun demikian, perubahan sosial tidak selalu bermakna disintegrasi. Teori strukturasi menegaskan bahwa masyarakat memiliki kapasitas reflektif untuk menegosiasikan perubahan dan mereproduksi struktur sosial secara kreatif (Giddens, 1984). Dalam konteks Tanah Kaili, perubahan sosial modern dapat menjadi peluang untuk merevitalisasi nilai-nilai adat dan keislaman melalui pendidikan, dialog sosial, dan penguatan institusi lokal. Dengan pendekatan yang kontekstual, modernitas dapat direspon tanpa kehilangan jati diri budaya dan religius masyarakat.

Dengan demikian, dinamika perubahan sosial di era modern merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Perubahan tersebut menuntut kemampuan adaptasi sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal dan keagamaan. Pemahaman akademik terhadap dinamika ini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi pendidikan Islam dan penguatan kearifan lokal, agar masyarakat Tanah Kaili mampu menghadapi modernitas secara kritis, selektif, dan berkeadaban.

BAB III

ISLAM SEBAGAI SISTEM NILAI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

A. Islam sebagai Sistem Nilai dan Etika Sosial

Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem keyakinan teologis dan ritual ibadah, tetapi juga sebagai sistem nilai dan etika sosial yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Dalam perspektif sosiologi agama, Islam memiliki dimensi normatif yang berfungsi membentuk orientasi nilai dan perilaku sosial pemeluknya. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan, harmonis, dan berkeadaban (Nasr, 2002).

Sebagai sistem nilai, Islam menempatkan tauhid sebagai prinsip fundamental yang melandasi seluruh aspek kehidupan. Tauhid tidak hanya bermakna pengakuan teologis terhadap keesaan Tuhan, tetapi juga memiliki implikasi etis dan sosial. Kesadaran tauhid melahirkan pandangan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Tuhan, sehingga menolak segala bentuk ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan (Fazlur Rahman, 1982). Dengan demikian, nilai tauhid menjadi basis bagi etika sosial Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial.

Islam juga menegaskan pentingnya nilai keadilan (*al-'adl*) sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menegakkan

keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam relasi personal maupun struktural. Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral dan sosial, yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok (Kamali, 2008). Dalam konteks sosial, nilai keadilan ini menjadi fondasi bagi terciptanya harmoni dan keseimbangan masyarakat.

Selain keadilan, Islam mengajarkan nilai kemaslahatan (*maslahah*) dan kepedulian sosial. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan sosial harus diarahkan pada kemanfaatan bersama dan pencegahan kemudharatan. Konsep *maslahah*, sebagaimana dikembangkan dalam pemikiran ushul fikih, menunjukkan bahwa Islam memiliki orientasi sosial yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Al-Shatibi, 2005). Nilai ini mendorong umat Islam untuk terlibat aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Etika sosial Islam juga tercermin dalam ajaran tentang akhlak. Akhlak dalam Islam mencakup sikap jujur, amanah, toleran, dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Al-Attas (1993), pendidikan akhlak merupakan inti dari peradaban Islam, karena akhlak berfungsi sebagai pengendali perilaku sosial dan penentu kualitas kehidupan kolektif. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya mengatur aspek hukum dan ritual, tetapi juga membentuk karakter sosial umat.

Dengan demikian, Islam sebagai sistem nilai dan etika sosial menyediakan kerangka normatif yang komprehensif bagi kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tauhid, keadilan, kemaslahatan, dan akhlak sosial menjadi landasan dalam membangun relasi sosial yang bermartabat dan berkeadaban. Pemahaman terhadap Islam sebagai sistem nilai sosial ini menjadi penting dalam konteks masyarakat modern, termasuk di Tanah Kaili, agar ajaran Islam dapat diaktualisasikan secara kontekstual dan transformatif dalam menghadapi dinamika perubahan sosial.

B. Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam

Moderasi beragama merupakan konsep penting dalam Islam yang menekankan sikap keberagamaan yang seimbang, adil, dan proporsional dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Dalam perspektif Islam, moderasi beragama berakar pada prinsip *wasathiyah*, yaitu posisi tengah yang menghindari sikap ekstrem, baik dalam bentuk fanatisme berlebihan maupun pengabaian terhadap ajaran agama. Konsep ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, dan kemanusiaan dalam kehidupan beragama (Kamali, 2015).

Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (umat yang moderat), sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Baqarah [2]: 143. Ayat ini menunjukkan bahwa moderasi merupakan identitas normatif umat Islam, yang mengandung makna keadilan, keseimbangan, dan kemampuan menjadi saksi bagi umat manusia. Menurut Fazlur Rahman (1982),

konsep *wasathiyyah* tidak sekadar sikap kompromis, tetapi prinsip etis yang menuntut pemahaman kontekstual terhadap ajaran Islam agar tetap relevan dengan realitas sosial.

Dalam kerangka etika sosial, moderasi beragama meniscayakan sikap toleran dan penghormatan terhadap keberagaman. Islam mengakui pluralitas sosial dan budaya sebagai bagian dari *sunnatullah*, sehingga perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai realitas yang harus dikelola secara etis. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im (2008) yang menekankan pentingnya interpretasi Islam yang mendukung koeksistensi damai dalam masyarakat majemuk.

Moderasi beragama juga berkaitan erat dengan cara memahami teks-teks keagamaan. Pendekatan tekstual yang kaku berpotensi melahirkan sikap eksklusif dan intoleran, sementara pendekatan kontekstual membuka ruang bagi dialog antara teks dan realitas sosial. Dalam hal ini, pemikiran *ushul fikih* yang menekankan *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan landasan teoretis bagi moderasi beragama. Prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan manusia menunjukkan bahwa tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia (Al-Shatibi, 2005).

Dalam konteks sosial kontemporer, moderasi beragama memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni dan kohesi sosial. Tantangan globalisasi, media digital, dan polarisasi identitas menuntut umat Islam untuk mengembangkan sikap keberagaman yang inklusif dan

dialogis. Menurut Esposito dan Mogahed (2007), keberagamaan yang moderat justru menjadi kunci bagi keberlanjutan peran agama dalam ruang publik modern.

Dengan demikian, moderasi beragama dalam perspektif Islam merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kemanusiaan. Moderasi bukanlah pelemahan identitas keagamaan, melainkan penguatan nilai-nilai etis Islam agar dapat berfungsi secara konstruktif dalam kehidupan sosial. Dalam konteks masyarakat lokal seperti Tanah Kaili, moderasi beragama menjadi landasan penting dalam merawat harmoni antara Islam, budaya lokal, dan dinamika sosial yang terus berkembang.

C. Islam dan Pembentukan Karakter Sosial

Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem keyakinan ritual, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk karakter individu dan tatanan sosial. Pembentukan karakter sosial dalam Islam bertumpu pada integrasi antara dimensi akidah, syariah, dan akhlak yang secara simultan membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Karakter sosial yang dibangun Islam berorientasi pada nilai keadilan, tanggung jawab, solidaritas, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Rahman, 1982).

Dalam perspektif Islam, karakter (*khuluq*) memiliki makna yang luas, mencakup disposisi batin yang tercermin dalam perilaku sosial. Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa misi utama kenabian adalah

penyempurnaan akhlak manusia. Akhlak tidak berhenti pada kesalehan personal, tetapi harus terwujud dalam relasi sosial yang etis dan konstruktif. Menurut Al-Ghazali (2000), akhlak yang baik adalah kondisi jiwa yang melahirkan perbuatan baik secara spontan tanpa paksaan, termasuk dalam interaksi sosial.

Islam menekankan pembentukan karakter sosial melalui nilai-nilai normatif yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan (*'adl*), empati (*ta'āwun*), dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Ibn Khaldun (2004) menegaskan bahwa keberlangsungan suatu masyarakat sangat ditentukan oleh kekuatan nilai moral dan solidaritas sosial (*'aṣabiyyah*) yang dimilikinya.

Pembentukan karakter sosial dalam Islam juga berlangsung melalui praktik ibadah yang memiliki dimensi sosial. Ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan haji mengandung pesan moral dan sosial yang kuat. Salat berjamaah, misalnya, mengajarkan disiplin, kesetaraan, dan kepemimpinan; zakat dan sedekah menumbuhkan solidaritas dan kepekaan terhadap kelompok rentan; sementara puasa melatih pengendalian diri dan empati sosial. Menurut Qardhawi (1997), ibadah dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan sosialnya, yaitu membentuk pribadi yang saleh secara individual dan sosial.

Dalam konteks pendidikan dan sosialisasi nilai, Islam mendorong pembentukan karakter sosial melalui proses

keteladanan (*uswah*), pembiasaan, dan internalisasi nilai secara berkelanjutan. Keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan menjadi arena strategis dalam membentuk karakter sosial yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Lickona (1991) yang menekankan pentingnya pendidikan karakter melalui integrasi antara moral knowing, moral feeling, dan moral action.

Dalam masyarakat lokal seperti Tanah Kaili, nilai-nilai Islam dalam pembentukan karakter sosial seringkali berkelindan dengan kearifan budaya setempat, seperti nilai kebersamaan, penghormatan terhadap adat, dan musyawarah. Integrasi antara ajaran Islam dan budaya lokal memperkuat internalisasi karakter sosial yang moderat dan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas normatif yang memungkinkan nilai-nilai universalnya diartikulasikan secara kontekstual tanpa kehilangan substansi ajarannya (Geertz, 1960).

Dengan demikian, Islam berperan signifikan dalam pembentukan karakter sosial yang berorientasi pada etika, keadilan, dan kemanusiaan. Karakter sosial yang dibangun melalui ajaran Islam menjadi modal penting bagi terciptanya masyarakat yang harmonis, berdaya, dan mampu menghadapi dinamika perubahan sosial secara beradab. Dalam kerangka ini, Islam tidak hanya menjadi sumber legitimasi moral, tetapi juga kekuatan transformasi sosial yang berkelanjutan.

D. Integrasi Nilai Keislaman dan Budaya Lokal

Integrasi nilai keislaman dan budaya lokal merupakan proses dialektis yang menempatkan Islam tidak sebagai kekuatan yang meniadakan tradisi, melainkan sebagai sistem nilai yang menjiwai dan memaknai praktik budaya masyarakat. Dalam perspektif sosiologi agama, agama dan budaya memiliki relasi timbal balik; agama memberi orientasi moral dan normatif, sementara budaya menjadi medium aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial (Berger, 1967).

Dalam Islam, keterbukaan terhadap budaya lokal tercermin dalam prinsip *al-‘ādah muḥakkamah*, yaitu pengakuan terhadap adat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam secara normatif memberikan ruang bagi budaya lokal untuk hidup dan berkembang sebagai bagian dari praktik keberagamaan masyarakat (Zuhaili, 1986). Dengan demikian, integrasi nilai keislaman dan budaya lokal bukanlah kompromi teologis, melainkan mekanisme kontekstualisasi ajaran Islam.

Sejarah Islam di Nusantara memperlihatkan bahwa proses islamisasi berlangsung melalui pendekatan kultural yang adaptif dan persuasif. Para ulama dan dai awal tidak menghapus struktur budaya yang ada, tetapi mengisinya dengan nilai-nilai Islam seperti tauhid, keadilan, dan akhlak mulia. Geertz (1960) menyebut proses ini sebagai bentuk “pribumisasi agama,” di mana Islam hadir dalam wajah lokal tanpa kehilangan

identitas universalnya. Pendekatan serupa terlihat dalam masyarakat Tanah Kaili, di mana nilai-nilai adat seperti kebersamaan, penghormatan kepada tetua, dan musyawarah diintegrasikan dengan etika Islam.

Integrasi nilai keislaman dan budaya lokal juga berfungsi sebagai sarana pembentukan identitas sosial yang moderat dan inklusif. Ketika nilai agama dan budaya saling menguatkan, masyarakat memiliki kerangka etika yang kokoh untuk mengelola perbedaan dan konflik sosial. Menurut Abdullah (2010), integrasi agama dan budaya lokal berkontribusi pada lahirnya praktik keberagamaan yang ramah, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Dalam konteks pendidikan dan pembinaan sosial, integrasi ini memiliki implikasi strategis. Nilai-nilai keislaman yang dikemas dalam simbol, tradisi, dan praktik budaya lokal lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Banks (2009) tentang pentingnya pendidikan berbasis budaya (*culturally responsive education*) dalam membentuk karakter dan kesadaran sosial peserta didik. Pendidikan Islam yang mengabaikan konteks budaya berpotensi kehilangan relevansi sosial dan daya transformasinya.

Namun demikian, integrasi nilai keislaman dan budaya lokal juga menghadapi tantangan, terutama ketika budaya lokal mengandung praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, atau kemanusiaan dalam Islam. Oleh karena itu, integrasi harus bersifat kritis dan selektif. Islam berperan sebagai tolok ukur

etik yang memurnikan budaya, sementara budaya berfungsi sebagai wahana kontekstualisasi ajaran Islam (Arkoun, 1994).

Dengan demikian, integrasi nilai keislaman dan budaya lokal merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadaban. Dalam masyarakat seperti Tanah Kaili, integrasi ini bukan hanya warisan historis, tetapi juga strategi masa depan dalam menghadapi dinamika sosial modern. Islam yang terintegrasi dengan budaya lokal mampu menjadi sistem nilai yang hidup, membumi, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

E. Islam Lokal: Antara Tradisi dan Transformasi

Islam lokal merupakan ekspresi keberagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam dialektika antara ajaran Islam yang bersifat universal dan konteks sosial-budaya masyarakat setempat. Dalam kerangka ini, Islam tidak hadir sebagai sistem nilai yang ahistoris dan statis, melainkan sebagai agama yang senantiasa berdialog dengan realitas sosial. Fenomena Islam lokal menunjukkan bahwa praktik keislaman selalu dipengaruhi oleh tradisi, struktur sosial, dan pengalaman historis komunitas tempat Islam itu dipraktikkan (Geertz, 1960).

Tradisi dalam Islam lokal berfungsi sebagai medium transmisi nilai keislaman dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui ritual, simbol, dan adat istiadat, nilai-nilai tauhid, akhlak, dan solidaritas sosial diinternalisasikan secara kultural. Menurut Shils (1981), tradisi memiliki peran penting dalam menjaga

kontinuitas nilai dan identitas sosial suatu masyarakat. Dalam konteks Islam lokal, tradisi menjadi sarana menjaga kesinambungan keberagamaan sekaligus memperkuat kohesi sosial.

Namun demikian, Islam lokal tidak terlepas dari proses transformasi. Perubahan sosial, modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru bagi praktik keagamaan lokal. Islam lokal dituntut untuk beradaptasi tanpa kehilangan akar tradisinya. Giddens (1991) menyebut proses ini sebagai refleksivitas modern, di mana tradisi direkonstruksi secara sadar untuk menyesuaikan diri dengan konteks baru. Dalam hal ini, Islam lokal mengalami transformasi bentuk, cara ekspresi, dan institusi pendukungnya.

Transformasi Islam lokal juga tampak dalam cara masyarakat menafsirkan ajaran Islam secara lebih kontekstual dan inklusif. Nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan sosial kontemporer. Menurut Fazlur Rahman (1982), dinamika penafsiran merupakan keniscayaan agar ajaran Islam tetap relevan dengan perubahan zaman. Pendekatan ini memungkinkan Islam lokal berperan sebagai kekuatan moral yang transformatif dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks masyarakat Tanah Kaili, Islam lokal merepresentasikan pertemuan antara nilai keislaman dan kearifan adat yang hidup. Praktik keagamaan tidak hanya dimaknai sebagai ritual individual, tetapi juga

sebagai bagian dari tatanan sosial dan budaya. Islam lokal di Tanah Kaili menunjukkan bagaimana tradisi adat dapat menjadi ruang artikulasi nilai Islam yang moderat, toleran, dan berorientasi pada harmoni sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdullah (2010) bahwa Islam lokal merupakan bentuk keberagamaan yang berakar kuat pada realitas sosial dan budaya masyarakat.

Meski demikian, ketegangan antara tradisi dan transformasi tidak selalu mudah dikelola. Munculnya pandangan keagamaan yang skripturalis dan puritan seringkali menantang legitimasi Islam lokal dengan menilai praktik tradisional sebagai *bid'ah* atau penyimpangan. Dalam situasi ini, diperlukan pendekatan keagamaan yang dialogis dan edukatif agar transformasi tidak berujung pada disintegrasi sosial. Arkoun (1994) menekankan pentingnya pembacaan kritis terhadap tradisi dan teks agama untuk menjaga keseimbangan antara autentisitas dan relevansi.

Dengan demikian, Islam lokal berada pada persimpangan antara menjaga tradisi dan mendorong transformasi. Kekuatan Islam lokal terletak pada kemampuannya merawat nilai-nilai tradisional yang bermakna sekaligus membuka diri terhadap perubahan sosial. Dalam konteks masa depan Tanah Kaili, Islam lokal berpotensi menjadi fondasi etika dan budaya yang menopang kehidupan sosial yang damai, berkeadaban, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

BAB IV

PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH KAILI: MADRASAH DAN TRANSMISI NILAI

A. Perkembangan Pendidikan Islam di Tanah Kaili

Pendidikan Islam di Tanah Kaili berkembang seiring dengan proses masuk dan menguatnya Islam sebagai sistem nilai dalam kehidupan sosial masyarakat. Sejak fase awal islamisasi, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai medium pembentukan karakter dan identitas sosial masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan Islam menjadi bagian integral dari dinamika sosial dan budaya lokal yang membentuk wajah keislaman di Tanah Kaili (Azra, 2004).

Pada tahap awal, pendidikan Islam di Tanah Kaili berlangsung secara non-formal melalui pengajian di rumah-rumah tokoh agama, surau, dan masjid. Model pendidikan ini menekankan penguasaan dasar-dasar keislaman seperti membaca al-Qur'an, fikih ibadah, dan akhlak. Pola transmisi nilai berlangsung secara personal dan berbasis keteladanan, di mana hubungan guru dan murid dibangun dalam suasana kekeluargaan dan kultural. Menurut Steenbrink (1986), pendidikan Islam tradisional di Nusantara memiliki peran penting dalam membumikan ajaran Islam sekaligus menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan munculnya lembaga pendidikan Islam yang lebih terstruktur, seperti madrasah dan pesantren. Kehadiran madrasah di

Tanah Kaili merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan pendidikan Islam yang sistematis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Madrasah tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga mulai mengintegrasikan mata pelajaran umum sebagai bagian dari upaya modernisasi pendidikan Islam. Proses ini sejalan dengan arus pembaruan pendidikan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 (Noer, 1996).

Pada masa pascakemerdekaan, pendidikan Islam di Tanah Kaili semakin memperoleh legitimasi melalui kebijakan negara yang mengakui madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Integrasi ini membawa implikasi pada peningkatan standar kelembagaan, kurikulum, dan profesionalisme guru. Namun demikian, madrasah tetap mempertahankan perannya sebagai pusat transmisi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Menurut Azra (2012), madrasah di Indonesia memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara tradisi keislaman dan tuntutan modernitas.

Dalam konteks lokal Tanah Kaili, pendidikan Islam tidak terlepas dari pengaruh budaya dan struktur sosial masyarakat setempat. Nilai-nilai lokal seperti kebersamaan, penghormatan terhadap otoritas moral, dan musyawarah diinternalisasikan dalam praktik pendidikan, baik secara eksplisit maupun implisit. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Tanah Kaili tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga kultural-sosiologis. Pendekatan ini memperkuat daya adaptasi pendidikan Islam dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah (Abdullah, 2010).

Memasuki era global dan digital, pendidikan Islam di Tanah Kaili menghadapi tantangan baru, seperti perubahan pola belajar, penetrasi budaya global, dan tuntutan kompetensi abad ke-21. Madrasah dituntut untuk melakukan inovasi pedagogis tanpa kehilangan orientasi nilai. Dalam konteks ini, pendidikan Islam memiliki peluang besar untuk menjadi agen transformasi sosial dengan mengintegrasikan nilai keislaman, kearifan lokal, dan keterampilan modern. Menurut Banks (2009), pendidikan yang responsif terhadap budaya lokal memiliki potensi lebih besar dalam membentuk peserta didik yang berkarakter dan berdaya saing.

Dengan demikian, perkembangan pendidikan Islam di Tanah Kaili menunjukkan proses historis yang dinamis, adaptif, dan kontekstual. Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam mentransmisikan ilmu dan nilai keislaman, tetapi juga menjadi ruang strategis dalam membentuk masa depan sosial dan budaya masyarakat Tanah Kaili.

B. Madrasah sebagai Institusi Sosial dan Kultural

Madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai institusi sosial dan kultural yang memiliki peran strategis dalam membentuk pola relasi, nilai, dan identitas masyarakat. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, madrasah dipahami sebagai ruang sosial tempat berlangsungnya proses sosialisasi nilai, internalisasi norma, dan reproduksi budaya keagamaan. Oleh karena itu, keberadaan madrasah di Tanah Kaili tidak dapat

dilepaskan dari struktur sosial dan dinamika budaya masyarakat setempat (Durkheim, 1956).

Sebagai institusi sosial, madrasah berperan dalam membangun kohesi dan integrasi masyarakat. Madrasah menjadi ruang pertemuan antara peserta didik, orang tua, guru, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Relasi sosial yang terbangun di lingkungan madrasah memperkuat solidaritas sosial dan rasa kebersamaan. Menurut Coleman (1988), institusi pendidikan memiliki fungsi penting dalam membentuk modal sosial (*social capital*) yang mendukung keberlanjutan kehidupan sosial suatu komunitas.

Dalam konteks Tanah Kaili, madrasah sering kali berfungsi sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan keagamaan, peringatan hari besar Islam, musyawarah warga, dan praktik solidaritas sosial kerap berpusat di madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah tidak hanya melayani kebutuhan pendidikan formal, tetapi juga kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat. Fungsi ganda ini memperkuat posisi madrasah sebagai institusi yang berakar kuat dalam kehidupan sosial lokal (Azra, 2012).

Sebagai institusi kultural, madrasah berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai keislaman yang berkelindan dengan budaya lokal. Proses pembelajaran di madrasah tidak hanya mentransfer pengetahuan kognitif, tetapi juga membentuk habitus budaya peserta didik melalui keteladanan, pembiasaan, dan simbol-simbol budaya yang hidup di lingkungan sekolah. Bourdieu (1977) menyatakan bahwa institusi pendidikan berperan dalam

membentuk habitus sosial yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak individu dalam masyarakat.

Madrasah di Tanah Kaili juga menjadi ruang dialog antara nilai Islam normatif dan kearifan lokal. Nilai-nilai seperti musyawarah, penghormatan kepada orang tua dan tokoh adat, serta kebersamaan sosial diinternalisasikan dalam praktik pendidikan madrasah. Integrasi ini menjadikan madrasah sebagai agen pelestari budaya lokal sekaligus agen transformasi sosial. Abdullah (2010) menegaskan bahwa pendidikan Islam yang mampu berdialog dengan budaya lokal akan memiliki daya tahan dan relevansi sosial yang lebih kuat.

Namun demikian, peran madrasah sebagai institusi sosial dan kultural tidak lepas dari tantangan. Modernisasi pendidikan, tuntutan administratif, dan standar nasional seringkali mendorong madrasah untuk lebih berorientasi pada capaian akademik semata. Jika tidak dikelola secara bijak, kondisi ini berpotensi mengikis fungsi kultural madrasah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan praktik pendidikan yang menempatkan madrasah tidak hanya sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai pusat pembinaan nilai dan budaya (Tilaar, 2009).

Dengan demikian, madrasah di Tanah Kaili memiliki peran ganda sebagai institusi sosial dan kultural yang strategis. Keberadaannya tidak hanya penting dalam mencetak generasi terdidik secara intelektual, tetapi juga dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal. Madrasah, dalam konteks

ini, menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara nilai lokal dan tantangan global, serta antara pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat.

C. Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal

Kurikulum pendidikan Islam berbasis kearifan lokal merupakan upaya strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal ajaran Islam dengan realitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Kurikulum tidak lagi dipahami semata sebagai dokumen normatif, tetapi sebagai konstruksi sosial yang merefleksikan kebutuhan, nilai, dan identitas komunitas di mana pendidikan itu berlangsung. Dalam konteks Tanah Kaili, pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal menjadi penting untuk memastikan relevansi pendidikan Islam dengan kehidupan nyata peserta didik (Tyler, 1949).

Secara konseptual, kurikulum berbasis kearifan lokal berangkat dari pandangan bahwa budaya lokal mengandung nilai-nilai etis dan pedagogis yang dapat memperkaya proses pembelajaran. Nilai-nilai seperti kebersamaan, musyawarah, penghormatan terhadap alam, dan solidaritas sosial memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kemaslahatan, dan akhlak mulia. Menurut Banks (2009), kurikulum yang responsif terhadap budaya lokal mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memperkuat internalisasi nilai.

Dalam pendidikan Islam, integrasi kearifan lokal dalam kurikulum dapat dilakukan melalui berbagai

pendekatan, baik pada level tujuan, materi, metode, maupun evaluasi pembelajaran. Materi fikih, akidah akhlak, dan sejarah kebudayaan Islam, misalnya, dapat dikontekstualisasikan dengan praktik sosial dan adat masyarakat Tanah Kaili. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Fazlur Rahman (1982) tentang pentingnya penafsiran kontekstual ajaran Islam agar tetap relevan dengan perubahan sosial.

Kurikulum berbasis kearifan lokal juga berfungsi sebagai sarana transmisi nilai sosial dan budaya secara sistematis. Melalui pembelajaran yang mengaitkan teks keagamaan dengan pengalaman lokal, peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara kognitif, tetapi juga menghayatinya sebagai pedoman hidup. Menurut Lickona (1991), pendidikan nilai yang efektif harus menyentuh dimensi pengetahuan, sikap, dan tindakan secara terpadu.

Dalam praktiknya, pengembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis kearifan lokal di madrasah memerlukan peran aktif guru sebagai perancang dan fasilitator pembelajaran. Guru dituntut memiliki sensitivitas budaya dan kemampuan reflektif untuk mengaitkan materi ajar dengan konteks lokal tanpa mengurangi substansi ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Pinar (2004) bahwa kurikulum merupakan pengalaman hidup yang dibangun melalui interaksi antara guru, peserta didik, dan lingkungan sosial.

Namun demikian, implementasi kurikulum berbasis kearifan lokal juga menghadapi tantangan, seperti

keterbatasan panduan operasional, tekanan standarisasi nasional, dan minimnya pelatihan guru. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang memberi ruang bagi madrasah untuk berinovasi secara kontekstual. Tilaar (2009) menegaskan bahwa desentralisasi kurikulum merupakan prasyarat penting bagi berkembangnya pendidikan yang berakar pada budaya lokal.

Dengan demikian, kurikulum pendidikan Islam berbasis kearifan lokal di Tanah Kaili memiliki potensi besar sebagai instrumen pembentukan karakter dan identitas sosial peserta didik. Kurikulum semacam ini tidak hanya memperkuat pemahaman keislaman, tetapi juga menumbuhkan kesadaran budaya, tanggung jawab sosial, dan kesiapan menghadapi dinamika perubahan sosial. Dalam kerangka ini, pendidikan Islam menjadi wahana strategis bagi keberlanjutan nilai-nilai lokal dan transformasi sosial yang berkeadaban.

D. Peran Guru dalam Transmisi Nilai Keislaman dan Budaya

Guru memiliki posisi sentral dalam proses transmisi nilai keislaman dan budaya, karena berperan sebagai mediator antara ajaran normatif Islam dan realitas sosial budaya peserta didik. Dalam perspektif pendidikan Islam, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan (*mu'allim*), tetapi juga sebagai pendidik (*murabbi*), pembimbing (*mursyid*), dan teladan moral (*uswah ḥasanah*). Peran multidimensional ini menjadikan guru sebagai aktor kunci dalam

pembentukan karakter dan identitas sosial generasi muda (Al-Attas, 1993).

Sebagai agen transmisi nilai keislaman, guru bertanggung jawab menginternalisasikan ajaran Islam secara holistik, mencakup aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Proses transmisi nilai tidak berlangsung secara mekanis melalui pengajaran kognitif semata, tetapi melalui keteladanan, pembiasaan, dan interaksi sosial yang bermakna. Menurut Lickona (1991), pendidikan nilai yang efektif sangat bergantung pada konsistensi antara apa yang diajarkan dan apa yang dicontohkan oleh pendidik dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks budaya lokal, guru berperan sebagai penjaga sekaligus penafsir nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Guru yang memiliki sensitivitas budaya mampu mengaitkan materi ajar dengan praktik sosial dan kearifan lokal peserta didik. Hal ini menjadikan pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Bourdieu (1977) menyatakan bahwa institusi pendidikan, melalui aktor-aktornya, berperan dalam mereproduksi dan mentransformasikan habitus budaya dalam masyarakat.

Di madrasah Tanah Kaili, peran guru dalam transmisi nilai keislaman dan budaya sering kali tercermin dalam integrasi nilai adat dan etika Islam dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai seperti musyawarah, penghormatan terhadap orang tua dan tokoh adat, serta solidaritas sosial diinternalisasikan melalui kegiatan belajar-mengajar dan interaksi keseharian di lingkungan madrasah. Pendekatan ini memperkuat posisi guru

sebagai agen budaya yang menjembatani tradisi lokal dan nilai keislaman universal (Abdullah, 2010).

Namun demikian, peran guru dalam transmisi nilai menghadapi berbagai tantangan di era modern, seperti perubahan pola komunikasi, pengaruh media digital, dan tuntutan administratif yang tinggi. Kondisi ini menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogis, kultural, dan spiritual. Menurut Banks (2009), guru yang efektif dalam konteks multikultural adalah mereka yang memiliki kemampuan reflektif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya.

Oleh karena itu, penguatan peran guru dalam transmisi nilai keislaman dan budaya memerlukan dukungan sistemik, baik melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kurikulum kontekstual, maupun kebijakan pendidikan yang berpihak pada penguatan nilai dan karakter. Tilaar (2009) menegaskan bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran dan pembentukan nilai.

Dengan demikian, guru di madrasah Tanah Kaili memiliki peran strategis sebagai pendidik, agen budaya, dan agen perubahan sosial. Melalui keteladanan dan pembelajaran kontekstual, guru tidak hanya mentransmisikan pengetahuan keislaman, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya lokal yang memperkaya praktik keberagamaan dan memperkuat kohesi sosial masyarakat.

E. Praktik Pembelajaran Kontekstual di Madrasah

Pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pedagogis yang menekankan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan pengalaman nyata peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan Islam, pembelajaran kontekstual bertujuan menjembatani nilai-nilai normatif ajaran Islam dengan realitas sosial dan budaya peserta didik. Pendekatan ini menjadi relevan bagi madrasah di Tanah Kaili yang memiliki kekayaan kearifan lokal sebagai sumber belajar yang bermakna (Johnson, 2002).

Secara konseptual, pembelajaran kontekstual berpijak pada prinsip bahwa pengetahuan akan lebih bermakna ketika dikonstruksi melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya. Peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif mengaitkan konsep keislaman dengan praktik sosial yang mereka alami. Menurut Dewey (1938), pengalaman langsung merupakan fondasi utama dalam proses belajar yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam praktik di madrasah, pembelajaran kontekstual dapat diwujudkan melalui integrasi materi ajar dengan fenomena sosial dan budaya lokal. Mata pelajaran fikih, misalnya, dapat dikaitkan dengan praktik ibadah dan muamalah yang hidup dalam masyarakat Tanah Kaili, seperti tradisi kebersamaan, musyawarah, dan solidaritas sosial. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik memahami fikih tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi sebagai pedoman etis dalam kehidupan sosial (Rahman, 1982).

Pembelajaran kontekstual juga mendorong penggunaan metode yang partisipatif dan reflektif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, proyek berbasis komunitas, dan observasi lapangan. Melalui metode ini, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis, berempati, dan bertanggung jawab secara sosial. Menurut Vygotsky (1978), interaksi sosial memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif dan pembentukan makna belajar.

Di madrasah Tanah Kaili, praktik pembelajaran kontekstual sering kali melibatkan lingkungan sosial sebagai laboratorium belajar. Kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, seperti peringatan hari besar Islam, kerja bakti, dan kegiatan adat, dapat dijadikan sumber belajar untuk menanamkan nilai keislaman dan budaya lokal. Pendekatan ini memperkuat fungsi madrasah sebagai institusi yang menyatu dengan kehidupan masyarakat (Abdullah, 2010).

Namun demikian, implementasi pembelajaran kontekstual menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan waktu, kesiapan guru, dan tuntutan kurikulum yang padat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kelembagaan dan pengembangan profesional guru agar pembelajaran kontekstual dapat berjalan secara efektif. Johnson (2002) menekankan bahwa keberhasilan pembelajaran kontekstual sangat bergantung pada kemampuan guru dalam merancang pengalaman belajar yang relevan dan bermakna.

Dengan demikian, praktik pembelajaran kontekstual di madrasah merupakan strategi penting dalam

mentransmisikan nilai keislaman dan budaya secara efektif. Melalui pembelajaran yang berakar pada realitas lokal, madrasah tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cakap secara akademik, tetapi juga berkarakter, berbudaya, dan memiliki kesadaran sosial. Pendekatan ini menjadikan pendidikan Islam sebagai kekuatan transformasi sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Tanah Kaili di era modern.

BAB V

PRAKTIK KEARIFAN LOKAL DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. Nilai-Nilai Lokal dalam Pembelajaran Fikih

Pembelajaran fikih pada hakikatnya tidak hanya bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan normatif tentang hukum Islam, tetapi juga membentuk kesadaran etis dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai lokal dalam pembelajaran fikih menjadi penting agar ajaran fikih tidak dipahami secara tekstual semata, melainkan kontekstual dan relevan dengan realitas sosial budaya peserta didik. Menurut Rahman (1982), pemahaman fikih yang kontekstual memungkinkan nilai-nilai syariat berfungsi secara dinamis dalam kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat, seperti kebersamaan, musyawarah, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap tatanan adat, memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar fikih Islam. Konsep *maslahah*, *'urf*, dan *maqāṣid al-sharī'ah* memberikan landasan normatif bagi pengakuan terhadap praktik sosial dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Al-Zuhaili (1986) menegaskan bahwa adat (*'urf*) dapat menjadi pertimbangan hukum dalam fikih apabila telah mengakar dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Dalam praktik pembelajaran, nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan melalui pemilihan contoh kasus fikih

yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Misalnya, pembahasan fikih muamalah dapat dikaitkan dengan tradisi gotong royong dan kerja sama ekonomi masyarakat lokal, sementara fikih ibadah dapat dihubungkan dengan praktik keagamaan yang hidup dalam komunitas. Pendekatan ini membantu peserta didik memahami bahwa fikih tidak terpisah dari realitas sosial, melainkan menjadi pedoman etis dalam kehidupan bermasyarakat (Abdullah, 2010).

Integrasi nilai-nilai lokal dalam pembelajaran fikih juga berkontribusi pada pembentukan sikap moderat dan toleran. Dengan memahami keragaman praktik sosial dan budaya, peserta didik diajak untuk bersikap terbuka dan menghargai perbedaan dalam bingkai nilai Islam. Menurut Qardhawi (1997), sikap moderasi (*wasatiyyah*) dalam fikih merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara keteguhan prinsip dan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam.

Peran guru menjadi sangat strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam pembelajaran fikih. Guru dituntut memiliki pemahaman fikih yang mendalam sekaligus kepekaan terhadap budaya lokal. Melalui pendekatan dialogis dan reflektif, guru dapat mengarahkan peserta didik untuk mengkaji praktik lokal secara kritis dan normatif. Pinar (2004) menyatakan bahwa kurikulum merupakan pengalaman belajar yang dibangun melalui interaksi antara guru, peserta didik, dan konteks sosial.

Namun demikian, integrasi nilai-nilai lokal dalam pembelajaran fikih juga menghadapi tantangan,

terutama terkait kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan dari ajaran normatif Islam. Oleh karena itu, diperlukan kerangka epistemologis yang jelas agar integrasi nilai lokal tetap berada dalam koridor syariat. Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dijadikan rujukan utama dalam menilai kesesuaian nilai-nilai lokal dengan tujuan hukum Islam (Kamali, 2008).

Dengan demikian, pembelajaran fikih yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal di Tanah Kaili berpotensi menjadi sarana efektif dalam mentransmisikan ajaran Islam yang kontekstual, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman fikih peserta didik, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kesadaran sosial sebagai bagian dari komunitas Muslim yang hidup dalam keberagaman budaya.

B. Integrasi Budaya Lokal dalam Akidah Akhlak dan Al-Qur'an Hadis

Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran Akidah Akhlak serta Al-Qur'an Hadis merupakan strategi pedagogis untuk menjadikan ajaran Islam lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Mata pelajaran Akidah Akhlak dan Al-Qur'an Hadis memiliki posisi sentral dalam pembentukan keimanan, moralitas, dan kesadaran sosial peserta didik. Oleh karena itu, pengaitannya dengan budaya lokal menjadi penting agar nilai-nilai keislaman tidak dipahami secara abstrak, melainkan dihayati dalam kehidupan sehari-hari (Lickona, 1991).

Dalam pembelajaran Akidah Akhlak, nilai-nilai budaya lokal dapat berfungsi sebagai medium konkret untuk menginternalisasikan konsep keimanan dan akhlak mulia. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kebersamaan, dan penghormatan kepada orang tua dan tokoh masyarakat merupakan nilai budaya yang sejalan dengan prinsip akhlak Islam. Al-Ghazali (2000) menegaskan bahwa akhlak yang baik bukan hanya hasil pemahaman intelektual, tetapi buah dari pembiasaan dan pengalaman hidup yang berulang.

Pembelajaran Al-Qur'an Hadis juga memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan budaya lokal melalui penafsiran kontekstual ayat dan hadis. Ayat-ayat tentang keadilan sosial, tolong-menolong, dan persaudaraan dapat dikaitkan dengan praktik sosial dan tradisi lokal yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Fazlur Rahman (1982) mengenai pentingnya memahami pesan moral al-Qur'an secara historis dan kontekstual agar relevan dengan situasi sosial kontemporer.

Integrasi budaya lokal dalam kedua mata pelajaran tersebut juga berkontribusi pada pembentukan sikap keberagamaan yang moderat dan inklusif. Dengan memahami bahwa nilai-nilai Islam dapat diekspresikan melalui berbagai bentuk budaya, peserta didik diajak untuk menghargai keragaman praktik keagamaan. Menurut Abdullah (2010), pendidikan Islam yang kontekstual mampu membangun kesadaran keagamaan yang dialogis dan terbuka terhadap perbedaan.

Dalam praktik pembelajaran, integrasi budaya lokal dapat diwujudkan melalui penggunaan contoh, narasi, dan studi kasus yang bersumber dari kehidupan masyarakat sekitar. Guru dapat mengaitkan materi Akidah Akhlak dan Al-Qur'an Hadis dengan peristiwa sosial, tradisi adat, dan nilai kearifan lokal yang relevan. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan peserta didik dan memperkuat internalisasi nilai. Banks (2009) menyebut pendekatan ini sebagai pendidikan yang responsif terhadap budaya (*culturally responsive education*).

Namun demikian, integrasi budaya lokal dalam pembelajaran Akidah Akhlak dan Al-Qur'an Hadis perlu dilakukan secara kritis dan selektif. Tidak semua praktik budaya dapat diadopsi tanpa pertimbangan normatif. Oleh karena itu, prinsip *al-ʿādah muḥakkamah* dan pendekatan *maqāṣid al-sharīʿah* menjadi rujukan penting dalam menilai kesesuaian nilai budaya dengan ajaran Islam. Al-Zuhaili (1986) menekankan bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, integrasi budaya lokal dalam pembelajaran Akidah Akhlak dan Al-Qur'an Hadis di Tanah Kaili merupakan upaya strategis dalam mentransmisikan nilai keislaman secara kontekstual, moderat, dan berakar pada realitas sosial. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keimanan dan akhlak peserta didik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran budaya dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari

masyarakat Muslim yang hidup dalam keragaman budaya.

C. Keteladanan, Pembiasaan, dan Budaya Religius Madrasah

Keteladanan dan pembiasaan merupakan dua pendekatan fundamental dalam pendidikan Islam yang berperan penting dalam membentuk budaya religius di lingkungan madrasah. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga transformasi sikap dan perilaku yang terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, madrasah sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab strategis dalam menciptakan lingkungan religius yang kondusif bagi internalisasi nilai-nilai keislaman (Al-Attas, 1993).

Keteladanan (*uswah hasanah*) menempati posisi sentral dalam proses pendidikan nilai. Guru dan tenaga kependidikan berfungsi sebagai figur moral yang perilakunya menjadi rujukan peserta didik. Konsistensi antara ajaran dan tindakan pendidik memperkuat kredibilitas nilai yang ditransmisikan. Menurut Bandura (1977), proses belajar sosial berlangsung melalui observasi dan imitasi terhadap model perilaku yang dianggap bermakna. Dalam konteks madrasah, keteladanan guru dalam menjalankan ibadah, berinteraksi sosial, dan menjunjung etika menjadi fondasi pembentukan karakter religius peserta didik.

Selain keteladanan, pembiasaan merupakan mekanisme penting dalam membentuk budaya religius. Pembiasaan dilakukan melalui praktik rutin seperti salat berjamaah,

membaca al-Qur'an, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, serta kegiatan sosial keagamaan. Praktik yang dilakukan secara konsisten akan membentuk disposisi batin dan perilaku yang menetap. Al-Ghazali (2000) menegaskan bahwa akhlak terbentuk melalui latihan dan pembiasaan yang berulang, sehingga nilai-nilai keislaman tidak berhenti pada tataran pengetahuan, tetapi terwujud dalam tindakan nyata.

Budaya religius madrasah merupakan hasil dari interaksi antara keteladanan, pembiasaan, dan sistem nilai yang dibangun secara kolektif. Budaya ini tercermin dalam suasana belajar yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, kepedulian sosial, dan sikap saling menghormati. Menurut Schein (2010), budaya organisasi terbentuk dari nilai, norma, dan praktik yang dipahami dan dijalankan bersama oleh anggota organisasi. Dalam madrasah, budaya religius menjadi identitas institusional yang membedakannya dari lembaga pendidikan lainnya.

Di madrasah Tanah Kaili, budaya religius sering kali berkelindan dengan nilai-nilai budaya lokal, seperti kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan kepada tokoh agama dan adat. Integrasi ini memperkuat penerimaan peserta didik terhadap nilai-nilai keislaman karena selaras dengan pengalaman sosial mereka. Abdullah (2010) menegaskan bahwa pendidikan Islam yang berakar pada budaya lokal memiliki daya internalisasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Namun demikian, pengembangan budaya religius madrasah menghadapi tantangan di era modern, seperti

pengaruh budaya populer, media digital, dan perubahan pola interaksi sosial. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan budaya religius yang adaptif dan partisipatif. Menurut Banks (2009), lingkungan pendidikan yang efektif adalah lingkungan yang mampu mengelola keragaman dan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Dengan demikian, keteladanan, pembiasaan, dan budaya religius madrasah merupakan pilar penting dalam pendidikan Islam berbasis kearifan lokal. Melalui keteladanan pendidik dan pembiasaan praktik keagamaan yang konsisten, madrasah di Tanah Kaili tidak hanya mentransmisikan pengetahuan keislaman, tetapi juga membentuk karakter religius dan sosial peserta didik secara holistik dan berkelanjutan.

D. Pendidikan Islam dan Harmonisasi Sosial

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun harmonisasi sosial, terutama dalam masyarakat yang plural secara budaya, sosial, dan keagamaan. Harmonisasi sosial merujuk pada kondisi kehidupan bersama yang ditandai oleh relasi yang seimbang, saling menghormati, dan kerja sama antaranggota masyarakat. Dalam perspektif Islam, harmoni sosial bukan hanya tujuan sosial, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai keimanan dan akhlak yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah (Rahman, 1982).

Sebagai sistem nilai, pendidikan Islam menanamkan prinsip-prinsip dasar yang menopang keharmonisan sosial, seperti keadilan (*'adl*), persaudaraan (*ukhuwwah*), toleransi (*tasāmuh*), dan musyawarah

(*shūrā*). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan etis dalam mengelola perbedaan dan mencegah konflik sosial. Menurut Qardhawi (1997), ajaran Islam tentang moderasi (*wasatiyyah*) menempatkan umat Islam pada posisi seimbang antara keteguhan prinsip dan keterbukaan sosial.

Dalam konteks madrasah, pendidikan Islam berfungsi sebagai wahana sosialisasi nilai-nilai harmonis melalui kurikulum, pembelajaran, dan budaya institusi. Proses pembelajaran yang dialogis dan kontekstual mendorong peserta didik untuk memahami keberagaman sebagai realitas sosial yang harus disikapi secara bijak. Vygotsky (1978) menekankan bahwa interaksi sosial dalam lingkungan belajar berperan penting dalam pembentukan kesadaran dan sikap sosial individu.

Pendidikan Islam berbasis kearifan lokal juga berkontribusi signifikan dalam membangun harmonisasi sosial. Nilai-nilai budaya lokal seperti kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap otoritas moral masyarakat menjadi sarana konkret untuk menanamkan etika sosial Islam. Dalam masyarakat Tanah Kaili, integrasi nilai Islam dan budaya lokal memperkuat kohesi sosial dan mencegah polarisasi identitas. Abdullah (2010) menyebut pendekatan ini sebagai bentuk pendidikan Islam yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

Selain itu, pendidikan Islam berperan dalam membentuk kesadaran kritis peserta didik terhadap potensi konflik sosial dan cara penyelesaiannya secara damai. Melalui pembelajaran fikih sosial, akhlak, dan

sejarah Islam, peserta didik diajak memahami pentingnya resolusi konflik, keadilan restoratif, dan dialog. Galtung (1996) menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membangun budaya damai (*culture of peace*) yang berkelanjutan.

Namun demikian, kontribusi pendidikan Islam terhadap harmonisasi sosial tidak bersifat otomatis. Tantangan seperti eksklusivisme keagamaan, pemahaman tekstual yang sempit, dan pengaruh ideologi transnasional dapat mengganggu fungsi harmonis pendidikan Islam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma pendidikan Islam yang moderat, inklusif, dan berbasis nilai kemanusiaan universal. Arkoun (1994) menekankan pentingnya pembacaan kritis dan dialogis terhadap teks dan tradisi keagamaan dalam konteks masyarakat modern.

Dengan demikian, pendidikan Islam di madrasah Tanah Kaili memiliki potensi besar sebagai instrumen harmonisasi sosial. Melalui integrasi nilai keislaman dan kearifan lokal, pendidikan Islam tidak hanya membentuk individu yang saleh secara ritual, tetapi juga warga masyarakat yang beretika, toleran, dan berkomitmen pada kehidupan sosial yang damai dan berkeadaban.

E. Studi Praktik dan Refleksi Lapangan

Studi praktik dan refleksi lapangan merupakan bagian penting dalam memahami implementasi kearifan lokal dalam pendidikan Islam secara nyata dan kontekstual. Pendekatan ini menempatkan realitas empirik sebagai sumber utama untuk menilai sejauh mana nilai-nilai

keislaman dan budaya lokal diinternalisasikan dalam praktik pendidikan di madrasah. Dalam penelitian pendidikan, refleksi lapangan berfungsi sebagai jembatan antara teori normatif dan praktik sosial yang berlangsung di ruang-ruang pendidikan (Creswell, 2014).

Praktik pendidikan Islam di madrasah Tanah Kaili menunjukkan bahwa integrasi nilai keislaman dan kearifan lokal tidak hanya berlangsung dalam dokumen kurikulum, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari antara guru, peserta didik, dan lingkungan sosial. Aktivitas seperti pembelajaran kontekstual, keteladanan guru, pembiasaan ibadah, serta keterlibatan madrasah dalam kegiatan sosial masyarakat menjadi bukti konkret berjalannya proses transmisi nilai secara kultural. Menurut Geertz (1960), praktik keagamaan yang hidup dalam masyarakat merefleksikan proses internalisasi nilai yang telah berakar secara sosial dan simbolik.

Refleksi lapangan juga mengungkap bahwa guru memegang peran sentral dalam mengontekstualisasikan ajaran Islam sesuai dengan realitas lokal. Guru tidak hanya menyampaikan materi ajar, tetapi juga menafsirkan nilai-nilai keislaman melalui bahasa, simbol, dan pengalaman sosial yang akrab bagi peserta didik. Proses ini memperkuat pemahaman peserta didik terhadap Islam sebagai pedoman hidup yang relevan dan membumi. Schön (1983) menyebut praktik semacam ini sebagai *reflective practice*, yaitu kemampuan pendidik untuk merefleksikan tindakan dan pengalaman guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dari sisi peserta didik, praktik pendidikan Islam berbasis kearifan lokal mendorong terbentuknya sikap religius yang moderat dan inklusif. Peserta didik tidak hanya memahami ajaran Islam secara normatif, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan nilai kebersamaan, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam membangun karakter sosial yang harmonis apabila dilaksanakan secara kontekstual. Temuan ini sejalan dengan pandangan Lickona (1991) bahwa pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan pengalaman nyata dan refleksi moral.

Namun demikian, refleksi lapangan juga menunjukkan adanya sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, variasi kompetensi guru, serta tekanan administratif yang memengaruhi optimalisasi praktik pembelajaran kontekstual. Selain itu, pengaruh budaya global dan media digital turut membentuk cara pandang peserta didik terhadap nilai agama dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas guru dan kebijakan pendidikan yang mendukung inovasi kontekstual di madrasah. Tilaar (2009) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan berbasis budaya sangat ditentukan oleh dukungan struktural dan keberpihakan kebijakan.

Secara reflektif, studi praktik lapangan di Tanah Kaili menegaskan bahwa pendidikan Islam berbasis kearifan lokal bukanlah konsep ideal yang utopis, melainkan praktik nyata yang dapat dikembangkan dan diperkuat. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa ketika madrasah mampu bersinergi dengan budaya lokal dan

kebutuhan sosial masyarakat, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai transmisi ilmu, tetapi juga sebagai kekuatan transformasi sosial. Dalam kerangka ini, pendidikan Islam berkontribusi langsung pada pembentukan masyarakat yang religius, berbudaya, dan berkeadaban (Abdullah, 2010).

Dengan demikian, studi praktik dan refleksi lapangan memberikan landasan empiris yang memperkuat argumentasi buku ini bahwa kearifan lokal merupakan modal penting dalam pengembangan pendidikan Islam. Refleksi atas praktik nyata di madrasah Tanah Kaili menjadi pijakan strategis untuk merumuskan model pendidikan Islam yang kontekstual, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan sosial masa kini dan masa depan.

BAB VI

DINAMIKA SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT TANAH KAILI

A. Relasi Islam, Adat, dan Kehidupan Sosial

Relasi antara Islam, adat, dan kehidupan sosial merupakan fondasi utama dalam pembentukan tatanan masyarakat yang berakar pada nilai religius dan budaya lokal. Dalam konteks masyarakat Nusantara, termasuk Tanah Kaili, Islam tidak hadir dalam ruang sosial yang hampa, melainkan berinteraksi secara dinamis dengan sistem adat yang telah lebih dahulu mengatur pola kehidupan sosial. Interaksi ini melahirkan bentuk keberislaman yang kontekstual, akomodatif, dan berkelanjutan dalam struktur sosial masyarakat.

Secara konseptual, adat dipahami sebagai seperangkat nilai, norma, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi sebagai pedoman hidup bersama. Sementara itu, Islam hadir sebagai sistem nilai transenden yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*) dan relasi antarmanusia (*ḥabl min al-nās*). Ketika Islam berinteraksi dengan adat, terjadi proses dialektika yang melahirkan sintesis nilai, bukan pertentangan. Koentjaraningrat (2009) menegaskan bahwa kebudayaan lokal memiliki kemampuan adaptif dalam menerima nilai baru tanpa kehilangan identitas dasarnya.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Kaili, relasi Islam dan adat tercermin dalam praktik-praktik sosial-keagamaan seperti ritus daur hidup, musyawarah adat,

solidaritas komunal, dan etika pergaulan sosial. Nilai-nilai Islam tentang kebersamaan (*ukhuwwah*), keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) terinternalisasi dalam norma adat yang menekankan harmoni, saling menghormati, dan tanggung jawab kolektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Geertz (1960) yang melihat agama sebagai sistem simbol yang membentuk motivasi dan pola tindakan sosial masyarakat.

Relasi Islam dan adat juga bersifat normatif dan etis. Dalam perspektif fikih sosial, adat (*'urf*) diakui sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Kaidah *al-'ādah muḥakkamah* menegaskan bahwa adat dapat menjadi dasar hukum dalam praktik sosial (Al-Zarqa, 1998). Prinsip ini menjelaskan mengapa Islam di Tanah Kaili mampu bersemi dan diterima secara luas, karena ia menghargai struktur sosial yang telah hidup dan berfungsi di tengah masyarakat.

Dalam konteks kehidupan sosial modern, relasi Islam dan adat menghadapi tantangan perubahan sosial yang cepat, seperti urbanisasi, globalisasi budaya, dan penetrasi nilai-nilai individualistik. Namun demikian, keberadaan nilai adat yang diinternalisasi dengan ajaran Islam berfungsi sebagai penyangga moral dalam menjaga kohesi sosial. Durkheim (1912) menyebut agama sebagai kekuatan integratif yang memperkuat solidaritas sosial, terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi.

Lebih jauh, relasi Islam, adat, dan kehidupan sosial tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga praktis dan institusional. Lembaga adat, tokoh agama, dan institusi pendidikan berperan sebagai mediator dalam merawat harmoni nilai tersebut. Sinergi antara ketiganya memungkinkan terbentuknya tatanan sosial yang religius sekaligus berbudaya. Abdullah (2010) menyebut pola ini sebagai *Islam kultural*, yaitu keberislaman yang tumbuh dari dialog kreatif antara teks agama dan konteks sosial.

Dengan demikian, relasi Islam, adat, dan kehidupan sosial di Tanah Kaili merupakan bentuk integrasi nilai yang dinamis dan reflektif. Relasi ini tidak hanya menjaga keberlanjutan tradisi dan identitas lokal, tetapi juga membuka ruang transformasi sosial yang berlandaskan nilai keislaman. Dalam kerangka ini, Islam tidak berfungsi sebagai kekuatan homogenisasi budaya, melainkan sebagai sumber etika sosial yang memperkaya dan memuliakan kehidupan masyarakat.

B. Pendidikan Islam dalam Pencegahan Konflik Sosial

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran sosial dan mencegah konflik di tengah masyarakat yang majemuk. Konflik sosial kerap muncul akibat perbedaan kepentingan, identitas, serta lemahnya pemahaman nilai-nilai etis dalam kehidupan bersama. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai medium internalisasi nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan toleransi yang menjadi fondasi harmoni sosial.

Secara normatif, ajaran Islam menempatkan perdamaian (*ṣulḥ*), keadilan (*‘adl*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai prinsip utama dalam relasi sosial. Al-Qur’an menegaskan pentingnya menyelesaikan perselisihan melalui dialog dan keadilan (QS. al-Hujurāt: 9–10). Nilai-nilai tersebut menjadi basis etik yang dapat ditransmisikan melalui proses pendidikan formal dan nonformal. Menurut Al-Attas (1991), pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia beradab (*insān ādabī*) yang mampu menempatkan diri secara proporsional dalam kehidupan sosial.

Dalam praktik pendidikan di madrasah dan lembaga pendidikan Islam, pencegahan konflik sosial dapat dilakukan melalui penguatan kurikulum berbasis nilai moderasi beragama, toleransi, dan resolusi konflik. Materi fikih muamalah, akidah akhlak, serta sejarah peradaban Islam dapat diarahkan untuk menumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan dan menghindari kekerasan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pendidikan transformatif yang menempatkan peserta didik sebagai agen perdamaian di lingkungannya (Freire, 1970).

Konteks Tanah Kaili yang plural secara budaya dan sosial menuntut pendidikan Islam yang sensitif terhadap kearifan lokal. Nilai-nilai adat seperti musyawarah, kebersamaan, dan penghormatan terhadap otoritas moral komunitas dapat diintegrasikan dalam pembelajaran sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis lokal. Abdullah (2010) menekankan bahwa integrasi nilai agama dan budaya lokal memperkuat

kohesi sosial dan mencegah konflik yang bersumber dari kesalahpahaman identitas.

Selain melalui kurikulum, peran pendidik menjadi kunci dalam pencegahan konflik sosial. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan moral dan mediator sosial. Keteladanan sikap inklusif, dialogis, dan adil dari guru akan membentuk iklim pendidikan yang damai dan kondusif. Vygotsky (1978) menyatakan bahwa interaksi sosial dalam lingkungan belajar berpengaruh signifikan terhadap pembentukan sikap dan perilaku peserta didik.

Pendidikan Islam juga berperan dalam membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap potensi konflik di masyarakat. Melalui diskusi reflektif, studi kasus, dan pembelajaran kontekstual, peserta didik diajak memahami akar konflik dan cara penyelesaiannya secara damai. Pendekatan ini memperkuat fungsi pendidikan Islam sebagai sarana rekonsiliasi sosial dan penguatan solidaritas komunitas (Azra, 2012).

Dengan demikian, pendidikan Islam merupakan instrumen penting dalam pencegahan konflik sosial, khususnya di masyarakat yang memiliki keragaman budaya seperti Tanah Kaili. Melalui internalisasi nilai-nilai keislaman yang moderat, integratif, dan kontekstual, pendidikan Islam berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadaban. Peran ini menegaskan bahwa pendidikan Islam bukan hanya proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga praksis sosial yang berdampak luas bagi kehidupan bersama.

C. Tantangan Globalisasi dan Digitalisasi Budaya

Globalisasi dan digitalisasi budaya merupakan dua arus besar yang secara signifikan memengaruhi struktur sosial, sistem nilai, dan praktik keberagamaan masyarakat kontemporer. Globalisasi membuka ruang interaksi lintas budaya tanpa batas geografis, sementara digitalisasi mempercepat penyebaran informasi, ide, dan simbol budaya melalui teknologi komunikasi. Dalam konteks masyarakat Tanah Kaili, kedua fenomena ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi keberlanjutan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.

Secara teoritis, globalisasi ditandai oleh intensifikasi hubungan sosial global yang menghubungkan peristiwa-peristiwa lokal dengan struktur global (Giddens, 1990). Proses ini berdampak pada terjadinya pergeseran identitas budaya dan agama, terutama di kalangan generasi muda. Nilai-nilai global yang bersifat individualistik, konsumtif, dan instan kerap berhadapan dengan nilai-nilai lokal yang menekankan kebersamaan, kesantunan, dan tanggung jawab sosial. Kondisi ini berpotensi melemahkan ikatan sosial dan otoritas nilai tradisional apabila tidak direspons secara kritis.

Digitalisasi budaya memperkuat dampak globalisasi melalui media sosial, platform digital, dan ruang virtual yang menjadi arena baru pembentukan identitas dan ekspresi keagamaan. Di satu sisi, media digital membuka akses luas terhadap pengetahuan keislaman dan memperluas dakwah. Namun di sisi lain, ia juga menjadi medium penyebaran paham keagamaan yang

dangkal, intoleran, atau terfragmentasi. Castells (2010) menyebut fenomena ini sebagai *network society*, di mana identitas dibentuk melalui jaringan informasi yang sering kali terlepas dari konteks sosial-budaya lokal.

Bagi masyarakat Tanah Kaili, digitalisasi budaya menantang mekanisme transmisi nilai yang selama ini berlangsung secara lisan, komunal, dan berbasis keteladanan. Tradisi musyawarah, penghormatan kepada tokoh adat dan agama, serta pembelajaran nilai melalui praktik sosial berpotensi terpinggirkan oleh budaya digital yang serba cepat dan individual. Menurut Appadurai (1996), arus budaya global (*-scapes*) dapat menggeser imajinasi sosial lokal jika tidak diimbangi dengan penguatan identitas budaya.

Dalam konteks pendidikan Islam, tantangan globalisasi dan digitalisasi menuntut adaptasi pedagogis yang bijak dan kontekstual. Pendidikan Islam tidak dapat bersikap defensif atau menolak teknologi, tetapi perlu memanfaatkannya sebagai sarana penguatan nilai. Integrasi literasi digital, etika bermedia, dan pemahaman keislaman yang moderat menjadi agenda penting dalam pembelajaran. Azra (2012) menegaskan bahwa pendidikan Islam harus mampu merespons modernitas tanpa kehilangan akar tradisi dan nilai lokal.

Selain itu, tantangan digital juga berkaitan dengan otoritas keagamaan. Informasi keislaman yang beredar bebas di ruang digital sering kali tidak melalui proses validasi ilmiah dan kultural. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan konflik pemahaman di tingkat akar

rumput. Oleh karena itu, peran lembaga pendidikan, tokoh agama, dan komunitas adat menjadi krusial dalam membimbing masyarakat agar mampu memilah informasi dan menjaga keseimbangan antara keterbukaan global dan kearifan lokal (Hefner, 2011).

Dengan demikian, globalisasi dan digitalisasi budaya merupakan tantangan nyata bagi keberlanjutan Islam dan budaya lokal di Tanah Kaili. Namun, tantangan ini juga membuka peluang transformasi jika direspons melalui pendidikan Islam yang adaptif, kritis, dan berakar pada nilai lokal. Upaya ini akan memastikan bahwa Islam tetap berfungsi sebagai sumber etika dan identitas, sementara budaya lokal tetap hidup dan relevan di tengah arus perubahan global.

D. Peran Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Lembaga Pendidikan

Tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan merupakan tiga pilar sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan nilai keislaman, kearifan lokal, serta harmoni sosial di tengah dinamika perubahan masyarakat. Dalam konteks Tanah Kaili, ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan berkolaborasi dalam membentuk tatanan sosial yang religius, berbudaya, dan berkeadaban.

Tokoh agama berperan sebagai penjaga dan penafsir nilai-nilai keislaman yang hidup di tengah masyarakat. Melalui dakwah, pengajian, dan keteladanan moral, tokoh agama mentransmisikan ajaran Islam secara normatif sekaligus kontekstual. Peran ini menjadi

penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi yang kerap menghadirkan pemahaman keagamaan yang parsial dan instan. Menurut Azra (2012), otoritas moral tokoh agama berfungsi sebagai penyeimbang antara teks keagamaan dan realitas sosial yang terus berubah.

Sementara itu, tokoh adat memiliki fungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya lokal dan penjamin harmoni sosial dalam komunitas. Dalam masyarakat Kaili, tokoh adat berperan dalam mengatur relasi sosial, menyelesaikan konflik berbasis musyawarah, serta menjaga tradisi yang sarat nilai etis. Adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem norma yang hidup dan adaptif. Koentjaraningrat (2009) menegaskan bahwa tokoh adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam membentuk perilaku kolektif masyarakat.

Relasi antara tokoh agama dan tokoh adat bersifat komplementer. Tokoh agama memberikan landasan teologis dan etis, sementara tokoh adat menyediakan kerangka kultural dan sosial bagi penerapan nilai-nilai tersebut. Sinergi ini memungkinkan internalisasi nilai Islam berlangsung secara damai dan diterima oleh masyarakat. Abdullah (2010) menyebut pola ini sebagai bentuk integrasi Islam kultural, di mana agama dan budaya saling memperkaya tanpa saling menegasikan.

Lembaga pendidikan, khususnya madrasah dan sekolah Islam, berperan sebagai ruang institusional untuk mentransmisikan nilai keislaman dan budaya lokal secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui kurikulum,

praktik pembelajaran, dan budaya sekolah, lembaga pendidikan membentuk karakter peserta didik agar memiliki kesadaran religius, identitas budaya, dan tanggung jawab sosial. Menurut Al-Attas (1991), pendidikan Islam bertujuan menanamkan adab sebagai fondasi pembentukan manusia paripurna.

Kolaborasi antara lembaga pendidikan dengan tokoh agama dan tokoh adat memperkuat efektivitas pendidikan Islam dalam masyarakat. Keterlibatan tokoh adat dan agama dalam kegiatan pendidikan, seperti pengayaan materi lokal, kegiatan keagamaan, dan penyelesaian masalah sosial, menjadikan pendidikan lebih kontekstual dan bermakna. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pendidikan berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam proses pendidikan (Freire, 1970).

Dengan demikian, peran tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga strategis dalam menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan nilai di Tanah Kaili. Sinergi ketiganya menjadi modal sosial yang penting dalam menghadapi tantangan perubahan zaman, sekaligus memastikan bahwa pendidikan Islam tetap relevan, inklusif, dan berakar pada kearifan lokal.

E. Strategi Penguatan Identitas Sosial dan Keagamaan

Penguatan identitas sosial dan keagamaan merupakan agenda strategis dalam menjaga keberlanjutan nilai, kohesi sosial, dan ketahanan budaya masyarakat di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. Identitas sosial-keagamaan tidak terbentuk secara instan, melainkan

melalui proses panjang internalisasi nilai, praktik sosial, dan pengalaman kolektif yang terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Tanah Kaili, penguatan identitas ini menjadi penting untuk memastikan bahwa Islam tetap berfungsi sebagai sumber etika sosial yang menyatu dengan kearifan lokal.

Secara teoritis, identitas sosial dipahami sebagai konstruksi yang terbentuk melalui interaksi individu dengan kelompok sosial dan sistem nilai yang dianutnya (Tajfel & Turner, 1986). Sementara itu, identitas keagamaan berfungsi sebagai sumber makna, orientasi moral, dan komitmen sosial. Pendidikan Islam memiliki posisi sentral dalam proses ini karena ia menjadi medium utama internalisasi nilai keislaman yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak individu dalam masyarakat (Al-Attas, 1991).

Salah satu strategi utama penguatan identitas sosial dan keagamaan adalah integrasi nilai Islam dan budaya lokal dalam pendidikan formal dan nonformal. Kurikulum pendidikan Islam yang kontekstual, yang mengaitkan ajaran Islam dengan realitas sosial dan tradisi lokal, memungkinkan peserta didik memahami agama sebagai bagian dari kehidupan sosialnya. Pendekatan ini mencegah terjadinya keterputusan antara identitas keagamaan dan identitas kultural (Abdullah, 2010).

Strategi lainnya adalah penguatan praktik sosial-keagamaan berbasis komunitas. Kegiatan keagamaan yang melibatkan partisipasi kolektif, seperti pengajian,

peringatan hari besar Islam, dan tradisi religius lokal, berfungsi sebagai ruang reproduksi identitas dan solidaritas sosial. Durkheim (1912) menegaskan bahwa ritual keagamaan memiliki fungsi integratif yang memperkuat kesadaran kolektif dan kohesi sosial masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan digitalisasi, penguatan identitas sosial dan keagamaan juga menuntut literasi digital yang beretika. Media digital perlu dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan edukasi yang moderat, inklusif, dan berakar pada nilai lokal. Pendidikan Islam berperan membekali generasi muda dengan kemampuan kritis dalam memilah informasi keagamaan dan membangun identitas digital yang sejalan dengan nilai keislaman dan budaya Kaili (Castells, 2010).

Peran tokoh agama, tokoh adat, dan pendidik menjadi kunci dalam strategi ini. Keteladanan mereka dalam bersikap, berdialog, dan merespons perbedaan akan membentuk iklim sosial yang sehat dan inklusif. Keteladanan sosial (*social modeling*) terbukti efektif dalam membentuk identitas dan perilaku kolektif, terutama di masyarakat yang masih menjunjung tinggi figur otoritatif (Bandura, 1986).

Dengan demikian, strategi penguatan identitas sosial dan keagamaan di Tanah Kaili harus bersifat integratif, partisipatif, dan adaptif. Melalui sinergi pendidikan Islam, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi secara bijak, identitas keislaman dan sosial masyarakat sebagai modal utama dalam membangun masa depan Tanah Kaili yang harmonis, berkeadaban, dan berkelanjutan.

BAB VII

ISLAM DAN MASA DEPAN TANAH KAILI

A. Arah Transformasi Pendidikan Islam

Transformasi pendidikan Islam merupakan keniscayaan dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terus berlangsung. Pendidikan Islam tidak dapat lagi dipahami sebatas proses pewarisan tradisi keagamaan, tetapi harus diposisikan sebagai kekuatan transformatif yang mampu membentuk sumber daya manusia beriman, berilmu, dan berdaya saing. Dalam konteks Tanah Kaili, transformasi pendidikan Islam menjadi strategi penting untuk memastikan keberlanjutan nilai keislaman yang berakar pada kearifan lokal sekaligus responsif terhadap tantangan global.

Secara konseptual, transformasi pendidikan Islam menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-doktrinal menuju pendekatan integratif dan kontekstual. Pendidikan Islam perlu mengintegrasikan dimensi teologis, etis, sosial, dan kultural dalam proses pembelajaran. Al-Attas (1991) menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan insan beradab yang mampu menempatkan ilmu dan nilai secara proporsional dalam kehidupan. Paradigma ini relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kaili yang tengah mengalami perubahan sosial dan budaya.

Arah transformasi pendidikan Islam juga ditandai oleh penguatan relevansi kurikulum dengan realitas lokal

dan kebutuhan masa depan. Kurikulum tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi keagamaan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, literasi digital, dan kesadaran sosial. Integrasi kearifan lokal Tanah Kaili dalam kurikulum pendidikan Islam menjadi langkah strategis untuk menjaga identitas budaya sekaligus memperkaya pengalaman belajar peserta didik (Abdullah, 2010).

Selain aspek kurikulum, transformasi pendidikan Islam menuntut inovasi pedagogis yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan pembelajaran kontekstual, kolaboratif, dan reflektif perlu dikembangkan agar peserta didik mampu mengaitkan nilai-nilai Islam dengan persoalan nyata di masyarakat. Freire (1970) menyebut pendidikan semacam ini sebagai pendidikan pembebasan yang mendorong kesadaran kritis dan partisipasi aktif dalam perubahan sosial.

Peran pendidik dalam arah transformasi pendidikan Islam juga mengalami pergeseran. Guru tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator, pembimbing moral, dan agen perubahan sosial. Penguatan kompetensi pedagogik, profesional, dan kultural guru menjadi prasyarat utama keberhasilan transformasi pendidikan Islam di Tanah Kaili (Vygotsky, 1978).

Lebih jauh, transformasi pendidikan Islam harus didukung oleh sinergi kelembagaan antara madrasah, keluarga, komunitas adat, dan pemerintah. Pendidikan Islam yang berorientasi masa depan memerlukan ekosistem pendidikan yang kolaboratif dan

berkelanjutan. Azra (2012) menekankan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan Islam sangat bergantung pada dukungan struktural dan kebijakan yang berpihak pada penguatan nilai dan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, arah transformasi pendidikan Islam di Tanah Kaili harus diarahkan pada penguatan nilai keislaman yang moderat, berakar pada budaya lokal, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Transformasi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan upaya strategis membangun masa depan masyarakat Kaili yang religius, berbudaya, dan berdaya saing di tingkat global.

B. Rekonstruksi Pendidikan Islam Berbasis Budaya Lokal

Rekonstruksi pendidikan Islam berbasis budaya lokal merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan akar identitas kultural dan religius masyarakat. Rekonstruksi ini tidak sekadar memperbaiki aspek teknis pendidikan, melainkan melakukan penataan ulang paradigma, tujuan, dan praktik pendidikan Islam agar lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Tanah Kaili, rekonstruksi tersebut diarahkan pada penguatan nilai-nilai Islam yang menyatu dengan kearifan lokal sebagai fondasi pembangunan masa depan.

Secara teoretis, rekonstruksi pendidikan Islam menuntut pendekatan integratif antara teks keagamaan dan konteks sosial-budaya. Pendidikan Islam tidak dapat

dipisahkan dari realitas masyarakat tempat ia tumbuh. Abdullah (2010) menegaskan bahwa pendidikan Islam yang kontekstual mampu menjembatani nilai normatif ajaran Islam dengan dinamika kehidupan sosial. Dalam hal ini, budaya lokal Tanah Kaili dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai sumber nilai dan media pedagogis yang kaya.

Rekonstruksi pendidikan Islam berbasis budaya lokal juga mencakup peninjauan ulang kurikulum agar lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kurikulum perlu memuat nilai-nilai lokal seperti kebersamaan, musyawarah, penghormatan terhadap alam, dan solidaritas sosial, yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Integrasi ini memungkinkan peserta didik memahami ajaran Islam sebagai nilai yang hidup dan relevan dalam konteks budaya mereka sendiri (Koentjaraningrat, 2009).

Pada level pedagogis, rekonstruksi diwujudkan melalui pengembangan metode pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif. Pembelajaran berbasis proyek, studi kasus lokal, dan keterlibatan komunitas adat menjadi strategi efektif untuk menginternalisasikan nilai keislaman dan budaya. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Freire (1970) tentang pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan peserta didik sebagai subjek perubahan sosial.

Peran pendidik dalam rekonstruksi pendidikan Islam berbasis budaya lokal menjadi sangat krusial. Guru dituntut memiliki sensitivitas budaya dan kemampuan reflektif dalam mengaitkan materi keislaman dengan

realitas lokal. Al-Attas (1991) menekankan bahwa pendidik Islam harus menjadi teladan adab dan penjaga kesinambungan nilai. Oleh karena itu, pengembangan profesional guru perlu diarahkan pada penguatan kompetensi kultural dan pedagogis.

Rekonstruksi pendidikan Islam juga memerlukan dukungan kelembagaan dan kebijakan yang berkelanjutan. Sinergi antara madrasah, keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah menjadi prasyarat penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif. Azra (2012) menegaskan bahwa reformasi pendidikan Islam hanya akan berhasil jika didukung oleh komitmen bersama dan kebijakan yang berpihak pada penguatan nilai lokal dan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, rekonstruksi pendidikan Islam berbasis budaya lokal di Tanah Kaili merupakan upaya strategis untuk membangun pendidikan yang berakar, relevan, dan berorientasi masa depan. Melalui integrasi nilai Islam dan kearifan lokal, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana pewarisan tradisi, tetapi juga sebagai kekuatan transformatif yang membentuk masyarakat Kaili yang religius, berbudaya, dan berdaya saing di era global.

C. Penguatan Moderasi Beragama dan Harmoni Sosial

Penguatan moderasi beragama merupakan agenda strategis dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang plural dan dinamis. Moderasi beragama meniscayakan sikap keberagamaan yang adil, seimbang, dan menghindari ekstremisme dalam

memahami maupun mempraktikkan ajaran agama. Dalam konteks Tanah Kaili yang kaya akan keragaman budaya dan tradisi, moderasi beragama menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan kehidupan sosial yang damai dan berkeadaban.

Secara konseptual, moderasi beragama berakar pada prinsip *wasatiyyah* dalam Islam, yaitu sikap tengah yang menempatkan keadilan, keseimbangan, dan kebijaksanaan sebagai landasan beragama (Quraish Shihab, 2019). Prinsip ini menolak sikap berlebihan (*ifrāt*) maupun pengabaian (*tafrīt*) terhadap nilai-nilai agama. Moderasi beragama tidak dimaksudkan untuk mengurangi komitmen keagamaan, melainkan untuk meneguhkan agama sebagai sumber rahmat bagi seluruh manusia (*rahmatan li al-‘ālamīn*).

Dalam konteks sosial, moderasi beragama berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik dan penguatan kohesi sosial. Sikap inklusif, dialogis, dan toleran terhadap perbedaan menjadi prasyarat terciptanya harmoni sosial. Durkheim (1912) menegaskan bahwa agama memiliki fungsi integratif dalam masyarakat apabila ia mampu membangun solidaritas, bukan fragmentasi. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama harus diarahkan pada internalisasi nilai etis Islam yang mendukung kehidupan bersama secara damai.

Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam penguatan moderasi beragama. Melalui kurikulum, pedagogi, dan budaya institusi pendidikan, nilai-nilai moderasi dapat ditanamkan secara sistematis dan

berkelanjutan. Materi akidah, fikih, dan sejarah Islam perlu disajikan dengan perspektif yang kontekstual dan historis agar peserta didik memahami keragaman pemikiran dan praktik dalam Islam. Azra (2012) menekankan bahwa pendidikan Islam yang moderat akan melahirkan generasi yang kritis, toleran, dan bertanggung jawab secara sosial.

Penguatan moderasi beragama di Tanah Kaili juga perlu bersinergi dengan kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap perbedaan. Nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi medium efektif untuk membumikan moderasi beragama dalam praktik sosial sehari-hari. Abdullah (2010) menyebut integrasi nilai agama dan budaya lokal sebagai strategi kultural yang efektif dalam membangun harmoni sosial.

Selain itu, peran tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan menjadi krusial dalam mengarusutamakan moderasi beragama. Keteladanan sikap moderat, dialog lintas kelompok, dan penyelesaian konflik secara damai akan membentuk iklim sosial yang kondusif. Bandura (1986) menegaskan bahwa pembelajaran sosial melalui keteladanan memiliki pengaruh kuat dalam membentuk sikap dan perilaku kolektif.

Dengan demikian, penguatan moderasi beragama merupakan kunci dalam membangun harmoni sosial dan masa depan Tanah Kaili yang damai dan inklusif. Melalui pendidikan Islam yang moderat, berakar pada budaya lokal, dan responsif terhadap tantangan zaman, masyarakat Kaili dapat mempertahankan identitas

keislaman yang autentik sekaligus hidup berdampingan secara harmonis dalam keberagaman.

D. Pendidikan Islam dan Pembangunan Peradaban Lokal

Pendidikan Islam memiliki peran fundamental dalam pembangunan peradaban lokal yang berakar pada nilai-nilai religius, etis, dan kultural masyarakat. Peradaban tidak semata dipahami sebagai kemajuan material, tetapi sebagai kualitas kehidupan sosial yang ditopang oleh sistem nilai, pengetahuan, dan praktik budaya yang berkelanjutan. Dalam konteks Tanah Kaili, pendidikan Islam menjadi instrumen strategis untuk membangun peradaban lokal yang bermartabat, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Secara filosofis, pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia paripurna (*insān kāmil*) yang seimbang antara dimensi spiritual, intelektual, dan sosial. Al-Attas (1991) menegaskan bahwa pendidikan Islam berorientasi pada pembentukan adab sebagai fondasi peradaban. Adab tidak hanya mengatur relasi individu dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia dan lingkungan. Prinsip ini relevan dalam membangun peradaban lokal Tanah Kaili yang menekankan harmoni sosial dan keseimbangan dengan alam.

Pembangunan peradaban lokal melalui pendidikan Islam menuntut integrasi nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal. Budaya Kaili yang menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap tatanan sosial dapat diperkaya dengan nilai-nilai Islam

tentang keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Integrasi ini menghasilkan sintesis nilai yang memperkuat identitas lokal sekaligus memperluas horizon peradaban (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam perspektif sosiologis, pendidikan Islam berfungsi sebagai mekanisme reproduksi nilai dan transformasi sosial. Melalui proses pendidikan yang berkelanjutan, nilai-nilai peradaban ditanamkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Durkheim (1912) menyebut pendidikan sebagai sarana utama pembentukan solidaritas sosial dan kesadaran kolektif. Dalam konteks Tanah Kaili, pendidikan Islam berperan menjaga kesinambungan nilai lokal di tengah arus globalisasi.

Pada level praksis, pembangunan peradaban lokal melalui pendidikan Islam diwujudkan melalui penguatan lembaga pendidikan, inovasi kurikulum, dan pembelajaran kontekstual. Madrasah dan lembaga pendidikan Islam perlu menjadi pusat pengembangan ilmu, etika, dan budaya lokal. Pembelajaran yang mengaitkan nilai keislaman dengan realitas sosial dan lingkungan lokal akan membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran peradaban dan tanggung jawab sosial (Freire, 1970).

Peran pendidik dan pemangku kepentingan lokal menjadi kunci dalam proses ini. Guru, tokoh agama, dan tokoh adat berfungsi sebagai agen peradaban yang menanamkan nilai melalui keteladanan dan praksis sosial. Sinergi antara pendidikan formal dan kehidupan komunitas memperkuat efektivitas pendidikan Islam

dalam membangun peradaban lokal yang hidup dan berkelanjutan (Abdullah, 2010).

Dengan demikian, pendidikan Islam dan pembangunan peradaban lokal di Tanah Kaili merupakan dua entitas yang saling terkait dan saling menguatkan. Melalui pendidikan Islam yang berakar pada nilai, budaya, dan realitas lokal, peradaban Kaili dapat tumbuh sebagai peradaban yang religius, berbudaya, dan berdaya saing. Pendidikan Islam dalam kerangka ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga fondasi utama bagi masa depan Tanah Kaili yang berkeadaban dan bermartabat.

E. Visi Masa Depan Tanah Kaili dalam Perspektif Islam

Visi masa depan Tanah Kaili dalam perspektif Islam bertumpu pada cita-cita terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, adil, dan berkeadaban. Islam memandang masa depan bukan sekadar kelanjutan waktu, tetapi sebagai amanah peradaban yang harus dibangun melalui ilmu, etika, dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka ini, Tanah Kaili diproyeksikan sebagai ruang sosial di mana nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal bersemi secara harmonis dan berkelanjutan.

Secara normatif, Islam menempatkan manusia sebagai *khalīfah fī al-ard*, yakni subjek yang bertanggung jawab memakmurkan bumi dan menjaga keseimbangan kehidupan (QS. al-Baqarah: 30). Prinsip kekhalifahan ini menjadi landasan teologis bagi pembangunan masa depan Tanah Kaili yang berorientasi pada kemaslahatan

bersama (*maṣlahah ‘āmmah*), keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Visi ini menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan dimensi moral dan spiritual (Quraish Shihab, 2019).

Dalam perspektif sosial, visi Islam tentang masa depan Tanah Kaili menekankan pentingnya harmoni sosial dan kohesi komunitas. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan (*ukhuwwah*), toleransi, dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama. Durkheim (1912) menyebut solidaritas sosial sebagai fondasi utama keberlangsungan masyarakat, sementara Islam memberikan kerangka etik yang memperkuat solidaritas tersebut melalui ajaran kasih sayang dan keadilan.

Pendidikan Islam menempati posisi sentral dalam mewujudkan visi masa depan tersebut. Pendidikan dipandang sebagai instrumen strategis untuk membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak, sekaligus memiliki kesadaran budaya dan tanggung jawab sosial. Al-Attas (1991) menegaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan melahirkan insan beradab yang menjadi pilar peradaban. Dalam konteks Tanah Kaili, pendidikan Islam yang berbasis budaya lokal akan melahirkan generasi yang kokoh identitasnya dan adaptif terhadap perubahan global.

Visi masa depan Tanah Kaili juga menuntut keterbukaan terhadap inovasi dan kemajuan, tanpa tercerabut dari nilai dasar. Islam mendorong umatnya untuk berpikir, berilmu, dan berikhtiar secara kreatif dalam menjawab tantangan zaman. Integrasi antara

ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman menjadi prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan dan bermartabat (Azra, 2012). Dalam hal ini, budaya lokal Kaili berfungsi sebagai penyangga identitas dan sumber etika dalam menghadapi modernitas.

Lebih jauh, visi Islam tentang masa depan Tanah Kaili menempatkan sinergi antara agama, budaya, dan institusi sosial sebagai kekuatan utama perubahan. Tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab kolektif dalam merawat nilai dan membangun masa depan bersama. Abdullah (2010) menyebut sinergi ini sebagai modal sosial-kultural yang menentukan arah peradaban lokal.

Dengan demikian, visi masa depan Tanah Kaili dalam perspektif Islam adalah visi tentang masyarakat yang beriman dan berilmu, berbudaya dan berkeadilan, serta mampu hidup harmonis dalam keberagaman dan perubahan. Islam, dalam kerangka ini, tidak hanya menjadi sistem keyakinan, tetapi juga sumber inspirasi peradaban yang menuntun Tanah Kaili menuju masa depan yang bermakna, berkelanjutan, dan diridhai Allah Swt.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Buku *Islam Bersemi di Tanah Kaili: Nilai, Praktik, dan Pendidikan Keislaman* menegaskan bahwa Islam di Tanah Kaili tumbuh dan berkembang melalui proses dialog yang dinamis antara ajaran normatif Islam, kearifan lokal, dan realitas sosial masyarakat. Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang meniadakan budaya lokal, melainkan sebagai sistem nilai yang menyatu, memperkaya, dan memberi arah etis bagi kehidupan sosial dan pendidikan masyarakat Kaili.

Kajian ini menunjukkan bahwa budaya lokal Tanah Kaili memiliki nilai-nilai dasar seperti kebersamaan, musyawarah, harmoni sosial, dan penghormatan terhadap tatanan sosial, yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, persaudaraan, dan kemaslahatan. Integrasi nilai Islam dan budaya lokal tersebut membentuk corak keberislaman yang moderat, inklusif, dan berkeadaban, sekaligus menjadi modal sosial dalam menjaga kohesi dan mencegah konflik sosial.

Pendidikan Islam menempati posisi strategis dalam mentransmisikan dan merekonstruksi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Melalui madrasah, kurikulum kontekstual, keteladanan guru, serta praktik pembelajaran yang relevan dengan realitas sosial, pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, penguatan identitas sosial-

keagamaan, dan transformasi sosial. Pendidikan Islam yang berbasis budaya lokal terbukti mampu menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi tanpa kehilangan akar identitas.

Lebih lanjut, buku ini menegaskan pentingnya sinergi antara tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam merawat harmoni sosial dan membangun masa depan Tanah Kaili. Penguatan moderasi beragama, literasi budaya, dan etika sosial menjadi prasyarat utama dalam menciptakan kehidupan bersama yang damai dan berkelanjutan. Islam, dalam konteks ini, berfungsi sebagai sumber etika publik dan inspirasi peradaban lokal.

Akhirnya, visi masa depan Tanah Kaili dalam perspektif Islam diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, berkeadilan, dan berdaya saing. Pendidikan Islam yang transformatif, kontekstual, dan berakar pada kearifan lokal menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi tersebut. Dengan demikian, *Islam Bersemi di Tanah Kaili* bukan sekadar wacana akademik, tetapi tawaran konseptual dan praksis untuk membangun peradaban lokal yang bermartabat dan berkelanjutan.

B. Implikasi

1. Temuan dan pemikiran yang diuraikan dalam buku *Islam Bersemi di Tanah Kaili: Nilai, Praktik, dan Pendidikan Keislaman* memiliki implikasi yang luas, baik pada ranah pendidikan, sosial-keagamaan, kebijakan publik, maupun pengembangan kajian akademik. Implikasi ini menegaskan bahwa integrasi

Islam dan kearifan lokal bukan sekadar fenomena kultural, melainkan strategi berkelanjutan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Pertama, pada ranah pendidikan Islam, buku ini berimplikasi pada perlunya pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis budaya lokal. Lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah, didorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal Tanah Kaili dalam materi ajar, metode pembelajaran, dan budaya sekolah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman keislaman peserta didik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran identitas sosial dan tanggung jawab kebudayaan. Kedua, pada ranah sosial-keagamaan, buku ini berimplikasi pada penguatan moderasi beragama dan harmoni sosial. Nilai-nilai Islam yang menyatu dengan adat dan tradisi lokal dapat dijadikan landasan etis dalam pencegahan konflik dan penguatan kohesi sosial. Tokoh agama dan tokoh adat diharapkan memperkuat dialog, musyawarah, dan keteladanan sebagai mekanisme penyelesaian persoalan sosial secara damai dan berkelanjutan. Ketiga, pada ranah kelembagaan dan kebijakan publik, buku ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan yang sensitif terhadap konteks lokal. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait perlu mendukung penguatan pendidikan Islam berbasis kearifan lokal melalui regulasi, pendanaan, dan pengembangan kapasitas pendidik. Sinergi antara lembaga pendidikan, institusi adat, dan komunitas keagamaan menjadi prasyarat keberhasilan kebijakan tersebut.

Keempat, pada ranah pengembangan sumber daya manusia, buku ini berimplikasi pada pentingnya pembentukan generasi muda yang beriman, berakhlak, dan berwawasan budaya. Pendidikan Islam yang transformatif diharapkan melahirkan generasi yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, etika digital, dan komitmen kebangsaan. Generasi semacam ini menjadi aktor kunci dalam merawat keberlanjutan Islam dan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Kelima, pada ranah akademik dan penelitian, buku ini membuka ruang bagi pengembangan kajian Islam lokal, pendidikan Islam kontekstual, dan relasi agama–budaya. Pendekatan interdisipliner yang memadukan studi keislaman, antropologi, sosiologi, dan pendidikan menjadi penting untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika Islam di tingkat lokal. Temuan dalam buku ini dapat dijadikan pijakan bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komparatif. Dengan demikian, implikasi buku ini menegaskan bahwa Islam yang bersemi di Tanah Kaili bukan hanya realitas historis dan kultural, tetapi juga potensi strategis bagi pembangunan pendidikan, sosial, dan peradaban lokal. Implementasi gagasan-gagasan dalam buku ini diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam membangun masyarakat Kaili yang religius, berbudaya, dan berdaya saing di masa depan.

2. Implikasi bagi pembelajaran islam

Pembelajaran Islam di Tanah Kaili memiliki posisi strategis sebagai sarana pewarisan nilai keislaman sekaligus media transformasi sosial yang berakar pada budaya lokal. Temuan dan refleksi konseptual dalam

buku ini menunjukkan bahwa pembelajaran Islam tidak dapat lagi dikembangkan secara normatif-dogmatis semata, melainkan perlu diarahkan pada penguatan makna, relevansi, dan kebermanfaatan ajaran Islam dalam kehidupan nyata peserta didik dan masyarakat.

Implikasi utama bagi pembelajaran Islam adalah perlunya pergeseran orientasi dari sekadar penguasaan materi ke arah internalisasi nilai dan praksis sosial keagamaan. Materi pembelajaran seperti akidah, fikih, dan akhlak hendaknya dikontekstualisasikan dengan realitas sosial-budaya masyarakat Kaili, sehingga peserta didik mampu melihat keterkaitan antara ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari, tradisi lokal, serta tantangan sosial yang mereka hadapi.

Selain itu, pembelajaran Islam perlu dikembangkan dengan pendekatan integratif antara teks keagamaan dan konteks budaya. Nilai-nilai kearifan lokal—seperti semangat kebersamaan, penghormatan terhadap sesepuh, musyawarah, dan harmoni sosial—dapat dijadikan pintu masuk pedagogis untuk memahami ajaran Islam secara lebih membumi. Pendekatan ini memperkuat kesadaran bahwa Islam hadir sebagai rahmat yang menuntun dan memuliakan budaya, bukan menegasikannya.

Implikasi berikutnya adalah penguatan peran guru sebagai pendidik nilai dan teladan moral. Guru Pendidikan Agama Islam dituntut tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga memiliki sensitivitas budaya dan kemampuan pedagogis untuk menanamkan nilai moderasi beragama, toleransi, dan etika sosial.

Keteladanan guru dalam sikap, bahasa, dan interaksi sosial menjadi bagian integral dari proses pembelajaran Islam itu sendiri.

Dalam konteks perubahan sosial dan digitalisasi, pembelajaran Islam juga perlu adaptif dan inovatif. Pemanfaatan teknologi pembelajaran harus diarahkan untuk memperkuat literasi keislaman yang kritis dan moderat, sekaligus membentengi peserta didik dari pemahaman keagamaan yang sempit dan eksklusif. Dengan demikian, pembelajaran Islam berfungsi sebagai ruang pembentukan kesadaran religius yang cerdas, terbuka, dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, implikasi bagi pembelajaran Islam menegaskan pentingnya desain pembelajaran yang kontekstual, humanis, dan berorientasi pada pembentukan karakter sosial. Pembelajaran Islam yang demikian akan berkontribusi nyata dalam menyiapkan generasi Muslim Tanah Kaili yang beriman, berakhlak, berbudaya, serta mampu berperan aktif dalam membangun masa depan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

C.Arah Penelitian Lanjutan

Buku ini membuka ruang bagi pengembangan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan beragam terkait relasi Islam, pendidikan, kearifan lokal, dan dinamika sosial di Tanah Kaili. Kajian yang telah disajikan masih bersifat konseptual dan deskriptif-kontekstual, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang mampu memperkaya perspektif teoretis sekaligus memberikan bukti empiris yang lebih kuat.

Pertama, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi empiris tentang implementasi pendidikan Islam berbasis kearifan lokal di madrasah dan sekolah. Penelitian kualitatif melalui observasi kelas, wawancara guru dan siswa, serta studi praktik pembelajaran akan memberikan gambaran konkret mengenai efektivitas integrasi nilai lokal dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Kedua, diperlukan penelitian komparatif antarwilayah untuk melihat variasi praktik Islam lokal dan model pendidikan Islam berbasis budaya di berbagai daerah. Perbandingan antara Tanah Kaili dan wilayah lain di Indonesia akan memperkaya khazanah keilmuan tentang Islam Nusantara serta membantu merumuskan model pendidikan Islam kontekstual yang adaptif dan replikatif.

Ketiga, penelitian lanjutan juga penting diarahkan pada kajian peran aktor sosial, seperti guru, tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan, dalam proses transmisi nilai keislaman dan budaya lokal. Pendekatan sosiologis dan antropologis dapat digunakan untuk memahami dinamika relasi kekuasaan, otoritas keagamaan, dan legitimasi budaya dalam pendidikan Islam.

Keempat, perkembangan globalisasi dan digitalisasi membuka peluang riset baru terkait transformasi identitas keislaman generasi muda. Penelitian tentang literasi keagamaan digital, penggunaan media sosial dalam pembelajaran Islam, serta tantangan moderasi beragama di ruang digital menjadi agenda penting

untuk memahami perubahan pola keberagamaan masyarakat Kaili di era kontemporer.

Kelima, penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan studi Islam, pendidikan, antropologi, dan sosiologi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap peran pendidikan Islam dalam membangun harmoni sosial, mencegah konflik, dan memperkuat peradaban lokal di Tanah Kaili.

Dengan arah penelitian lanjutan tersebut, diharapkan lahir kajian-kajian yang tidak hanya memperdalam pemahaman akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan Islam dan penguatan kehidupan sosial keagamaan yang berkelanjutan di Tanah Kaili.

D. Daftar Pustaka

Abdullah, A. (2012). *Islam, budaya, dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdullah, A. (2019). *Multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin: Metode studi agama dan studi Islam*. Yogyakarta: IB Pustaka.

Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*. Jakarta: Logos.

Azra, A. (2015). *Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal*. Bandung: Mizan.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for*

the sociology of education (pp. 241–258). New York, NY: Greenwood.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Durkheim, E. (1995). *The elementary forms of religious life* (K. E. Fields, Trans.). New York, NY: Free Press.

Fukuyama, F. (2001). *Social capital and civil society*. Washington, DC: International Monetary Fund.

Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures*. New York, NY: Basic Books.

Geertz, C. (1983). *Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology*. New York, NY: Basic Books.

Hasan, N. (2018). *Islam politik di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hidayat, K. (2016). *Islam, negara, dan civil society*. Jakarta: Paramadina.

Huntington, S. P. (1996). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. New York, NY: Simon & Schuster.

Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Madjid, N. (1997). *Islam, kemodernan, dan keindonesiaan*. Bandung: Mizan.

Madjid, N. (2000). *Islam doktrin dan peradaban*. Jakarta: Paramadina.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Nasr, S. H. (2003). *Islam: Religion, history, and civilization*. New York, NY: HarperCollins.

Nata, A. (2010). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York, NY: Simon & Schuster.

Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Salim, A. (2015). *Pendekatan sosiologi dalam studi Islam*. Jakarta: Kencana.

Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. New York, NY: Holt, Rinehart and Winston.

Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Suyanto, B., & Sutinah. (2015). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Kencana.

Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

UNESCO. (2015). *Rethinking education: Towards a global common good?* Paris: UNESCO Publishing.

Wahid, A. (2001). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute.

Weber, M. (1978). *Economy and society*. Berkeley, CA: University of California Press.

Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Zuhdi, M. (2017). *Islam moderat dalam konteks Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Zuhri, S. (2013). *Beragama secara sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

E.Lampiran

1.Snopsis Buku

Buku *Islam dan Masa Depan Tanah Kaili: Pendidikan Islam, Kearifan Lokal, dan Dinamika Sosial* mengkaji secara mendalam relasi antara Islam, budaya lokal, dan perubahan sosial dalam konteks masyarakat Kaili. Islam dipahami tidak hanya sebagai sistem keyakinan, tetapi sebagai sistem nilai yang hidup, berinteraksi, dan membentuk identitas sosial serta praktik pendidikan masyarakat setempat.

Melalui pendekatan sosio-kultural dan pendidikan Islam, buku ini menelusuri sejarah sosial Tanah Kaili, nilai-nilai dasar kearifan lokal, serta dinamika relasi antara adat, agama, dan struktur sosial. Pembahasan difokuskan pada bagaimana nilai-nilai Islam terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat dan diwariskan melalui lembaga pendidikan, khususnya madrasah, sebagai institusi strategis dalam transmisi nilai keislaman dan budaya lokal.

Buku ini juga menyoroti peran pendidikan Islam sebagai basis perubahan sosial. Kurikulum, peran guru, praktik pembelajaran kontekstual, serta integrasi nilai keislaman dan kearifan lokal dibahas sebagai fondasi penting dalam membangun karakter siswa yang religius, moderat, dan berkepribadian sosial. Dalam konteks tantangan globalisasi dan digitalisasi, pendidikan Islam diposisikan sebagai ruang penguatan moderasi beragama dan harmoni sosial.

Dengan mengaitkan tradisi dan transformasi, buku ini menawarkan refleksi kritis tentang masa depan Tanah Kaili dalam perspektif Islam. Ditekankan bahwa keberlanjutan peradaban lokal hanya dapat terwujud melalui pendidikan Islam yang kontekstual, inklusif, dan berakar pada budaya, sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman. Buku ini diharapkan menjadi rujukan bagi pendidik, akademisi, pemerhati pendidikan Islam, serta siapa pun yang peduli pada penguatan identitas Islam lokal dan pembangunan sosial yang berkeadaban.

2. Profil Penulis

Profil Penulis

Dr. Bahdar, M.H.I. adalah dosen dan akademisi di bidang **Fikih dan Ushul Fikih** pada Fakultas Tarbiyah, **UIN Datokarama Palu**. Aktif mengajar mata kuliah fikih, ushul fikih, dan pendidikan Islam, dengan fokus kajian pada integrasi nilai-nilai syariat dalam praktik pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Latar belakang keilmuan berpijak pada studi fikih klasik dan kontemporer yang dipadukan dengan pendekatan pendidikan modern dan penelitian kualitatif. Minat akademik meliputi **fikih pendidikan, fikih pembelajaran, pembentukan karakter religius, serta integrasi kearifan lokal dalam pendidikan Islam**, khususnya di konteks madrasah dan masyarakat Muslim Indonesia.

Selain mengajar, juga aktif melakukan penelitian dan penulisan ilmiah, baik dalam bentuk artikel jurnal nasional dan internasional maupun buku ajar. Beberapa karya berfokus pada rekonstruksi pembelajaran fikih, internalisasi nilai sosial-budaya lokal, serta penguatan

dimensi etika dan spiritual dalam pendidikan Islam. Selain itu juga menyusun khutbah, dan buku panduan ibadah yang digunakan di lingkungan masyarakat. Melalui karya ini, penulis berharap dapat mendorong lahirnya praktik pendidikan Islam yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai syariat dan akhlak mulia.